



Foto: Rahma Yulianti (Kompos Gramedia)

**BUKU 2**

# **MASTER PLAN SMART CITY**

**KABUPATEN LUWU  
2023**



## SAMBUTAN KEPALA DAERAH



Seiring berjalannya waktu, cara kita berpikir mengalami perubahan yang signifikan, dari orde lama, orde baru, hingga zaman pemerintahan saat ini. Peningkatan teknologi telah menjadi katalisator utama dalam transformasi ini, membuka peluang baru dan tantangan yang perlu kita jawab bersama. Penting untuk diakui bahwa menjadi *smart city* bukanlah sekadar tentang teknologi canggih, tetapi juga mengenai bagaimana kita memanfaatkannya untuk meningkatkan kualitas hidup warga.

Dalam upaya mewujudkan visi ini, kita harus percaya bahwa keberhasilan tidak hanya terletak pada penguasaan teknologi semata, melainkan juga pada kecerdasan dalam tiga dimensi: kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual. Kita perlu memahami bahwa teknologi tanpa kepemimpinan yang cerdas dan etika yang kuat tidak akan memberikan manfaat sebesar yang diharapkan.

Dalam setiap langkah yang diambil, kita mengakui pentingnya integritas. Program-program yang dirancang bukan semata-mata untuk mendapatkan anggaran, tetapi untuk memberikan solusi yang nyata kepada masyarakat. Oleh karena itu, perlu ditekankan pentingnya memahami dengan baik tupoksi setiap OPD dan instansi terkait, agar program-program yang direncanakan dapat mencapai tujuan yang diinginkan.

Untuk semua peserta dari OPD yang telah mengikuti setiap kegiatan dalam penyusunan master plan *smart city* ini diharapkan dapat menjadi motivator, sumber inspirasi, dan agen perubahan yang menyebarkan semangat *smart city* kepada orang lain. Kita tidak hanya ingin menjadi yang terbaik, tetapi juga menjadi contoh yang menginspirasi daerah lain. Marilah kita camkan dengan baik ilmu yang diperoleh guna menciptakan Smart City Kabupaten Luwu yang bukan hanya cerdas secara teknologi, tetapi juga cerdas secara manusiawi

Belopa, Oktober 2023  
Bupati Kabupaten Luwu

**Dr. Drs. H. Basmin Mattayang, MPd**

## SAMBUTAN SEKRETARIS DEWAN SMART CITY

Puji Syukur saya panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa karena berkat rahmat Beliau Buku II Master Plan Smart City Kabupaten Luwu dapat diselesaikan dengan baik. Buku ini merupakan langkah konkret dalam mewujudkan konsep pengelolaan kota yang berkelanjutan dan berdaya saing di Kabupaten Luwu. Tujuan utama kami adalah menciptakan kehidupan masyarakat yang lebih aman, lebih mudah, lebih sehat, dan lebih makmur, dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi serta inovasi yang diarahkan untuk perbaikan kinerja, peningkatan efisiensi, dan melibatkan partisipasi masyarakat secara menyeluruh.

Di dalam Buku II ini, termuat peta jalan yang merinci rencana aksi Kabupaten Luwu dalam setiap dimensi Smart City, yang melibatkan Smart Governance, Smart Branding, Smart Economy, Smart Living, Smart Society, dan Smart Environment. Setiap dimensi dilengkapi dengan inovasi-inovasi yang dirancang untuk mengoptimalkan potensi dan memberikan solusi terbaik bagi Kabupaten Luwu.

Visi kami untuk Smart City Kabupaten Luwu adalah **"LUWU MENUJU SMART CITY YANG BERKELANJUTAN DALAM NUANSA RELIGI"**. Melalui visi ini, kami berkomitmen untuk tidak hanya menciptakan sebuah pusat kegiatan perkotaan yang canggih secara teknologi, tetapi juga menjaga nilai-nilai keagamaan yang menjadi landasan moral masyarakat kami.

Proses perencanaan dan pembuatan Buku II Master Plan ini bukanlah suatu usaha yang dilakukan sendiri, tetapi merupakan kolaborasi yang erat antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pihak terkait. Kami menghargai setiap kontribusi dan dukungan yang telah diberikan dalam upaya mewujudkan visi luar biasa ini.

Semoga buku ini tidak hanya menjadi panduan, tetapi juga menjadi inspirasi bagi kita semua untuk bergerak maju menuju masa depan yang lebih cerah dan berkelanjutan.

Belopa, Oktober 2023  
Sekretaris I Dewan Smart City Kabupaten Luwu

**Drs. Muhammad Yusuf, M.Pd**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN DEPAN</b> .....	i
<b>SAMBUTAN KEPALA DAERAH</b> .....	ii
<b>SAMBUTAN SEKRETARIS DEWAN SMART CITY</b> .....	iii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iv
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	vi
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	vii
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 LATAR BELAKANG .....	2
1.2 MAKSUD DAN TUJUAN .....	3
1.3 LANDASAN HUKUM .....	4
1.4 KERANGKA PIKIR.....	6
<b>BAB 2 ARAH PEMBANGUNAN SMART CITY</b> .....	9
2.1 VISI, MISI, DAN SASARAN SMART CITY.....	10
2.1.1 Visi Smart City Kabupaten Luwu .....	10
2.1.2 Misi Smart City Kabupaten Luwu .....	10
2.1.3 Sasaran Smart City Kabupaten Luwu .....	12
2.2 INDIKATOR UTAMA SMART CITY KABUPATEN LUWU .....	16
2.2.1 Indikator Utama Smart Governance.....	16
2.2.2 Indikator Utama Smart Branding.....	18
2.2.3 Indikator Utama Smart Economy .....	19
2.2.4 Indikator Utama Smart Living.....	21
2.2.5 Indikator Utama Smart Society.....	24
2.2.6 Indikator Utama Smart Environment .....	26
<b>BAB 3 STRATEGI PEMBANGUNAN SMART CITY</b> .....	29
3.1 STRATEGI SMART GOVERNANCE .....	30
3.2 STRATEGI SMART BRANDING .....	31
3.3 STRATEGI SMART ECONOMY .....	32
3.4 STRATEGI SMART LIVING.....	33
3.5 STRATEGI SMART SOCIETY .....	34
3.6 STRATEGI SMART ENVIRONMENT .....	35
<b>BAB 4 RENCANA AKSI SMART CITY</b> .....	37
4.1 RENCANA AKSI SMART GOVERNANCE .....	39

4.2	RENCANA AKSI SMART BRANDING .....	42
4.3	RENCANA AKSI SMART ECONOMY.....	45
4.4	RENCANA AKSI SMART LIVING.....	47
4.5	RENCANA AKSI SMART SOCIETY .....	51
4.6	RENCANA AKSI SMART ENVIRONMENT .....	53
<b>BAB 5</b>	<b>PETA JALAN PEMBANGUNAN SMART CITY .....</b>	<b>57</b>
5.1	PETA JALAN SMART GOVERNANCE.....	59
5.2	PETA JALAN SMART BRANDING .....	63
5.3	PETA JALAN SMART ECONOMY .....	69
5.4	PETA JALAN SMART LIVING .....	77
5.5	PETA JALAN SMART SOCIETY .....	85
5.6	PETA JALAN SMART ENVIRONMENT .....	92
<b>BAB 6</b>	<b>PENUTUP.....</b>	<b>102</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>		<b>104</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1	Pemetaan Misi, Subdimensi, dan Sasaran Smart City.....	10
Tabel 2	Indikator Utama Smart Governance Kabupaten Luwu .....	16
Tabel 3	Indikator Utama Smart Branding Kabupaten Luwu .....	18
Tabel 4	Indikator Utama Smart Economy Kabupaten Luwu .....	20
Tabel 5	Indikator Utama Smart Living Kabupaten Luwu .....	21
Tabel 6	Indikator Utama Smart Society Kabupaten Luwu .....	24
Tabel 7	Indikator Utama Smart Environment Kabupaten Luwu .....	26
Tabel 8	Strategi Pembangunan Smart Governance Kabupaten Luwu .....	30
Tabel 9	Strategi Pembangunan Smart Branding Kabupaten Luwu .....	31
Tabel 10	Strategi Pembangunan Smart Economy Kabupaten Luwu .....	32
Tabel 11	Strategi Pembangunan Smart Living Kabupaten Luwu.....	33
Tabel 12	Strategi Pembangunan Smart Society Kabupaten Luwu.....	34
Tabel 13	Strategi Pembangunan Smart Environment Kabupaten Luwu .....	36
Tabel 14	Rencana Aksi Smart Governance.....	39
Tabel 15	Rencana Aksi Smart Branding .....	42
Tabel 16	Rencana Aksi Smart Economy.....	45
Tabel 17	Rencana Aksi Smart Living .....	47
Tabel 18	Rencana Aksi Smart Society .....	51
Tabel 19	Rencana Aksi Smart Environment.....	53
Tabel 20	Peta Jalan Smart Governance .....	59
Tabel 21	Peta Jalan Smart Branding .....	63
Tabel 22	Peta Jalan Smart Economy .....	69
Tabel 23	Peta Jalan Smart Living .....	77
Tabel 24	Peta Jalan Smart Society .....	85
Tabel 25	Peta Jalan Smart Environment .....	92

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Kerangka Pikir Penyusunan Master Plan Smart City Kabupaten Luwu . 7	
Gambar 2 Proses Interpretasi Misi Smart City dari Misi RPJMD Kabupaten Luwu 2019-2024 .....	12



# 1

---

# PENDAHULUAN

KABUPATEN LUWU

Dokumen Master Plan Smart City Kabupaten Luwu merupakan dokumen utama dari serangkaian dokumen yang dibuat selama proses Penyusunan Master Plan Smart City 2023. Dokumen ini berisikan hasil analisis yang telah dilakukan sebelumnya dan menjabarkan dengan lebih detil mengenai langkah – langkah strategis yang akan dilakukan dalam penerapan konsep smart city nasional di Kabupaten Luwu. Dokumen ini dapat menjadi pedoman dalam proses pelaksanaan penerapan smart city di Kabupaten Luwu.

## **1.1 LATAR BELAKANG**

Konsep smart city merupakan sebuah konsep yang muncul dari kekhawatiran akan semakin buruknya kualitas hidup perkotaan. Pertambahan penduduk yang tidak terkontrol bukan satu-satunya penyebab memburuknya kondisi perkotaan. Lebih dari itu, ada faktor kurangnya manajemen yang tepat seiring dengan perkembangan perkotaan dan segala dinamika di dalamnya (Ooi & Phua, 2007).

Di akhir 1990an smart city mulai dikenal sebagai respon atas perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang semakin cepat. Konsep awal ini lebih menekankan pada digital city atau kota digital dimana TIK masuk sebagai salah satu elemen penting dalam manajemen perkotaan (Hsiao et al., 2019). Namun kenyataannya, masuknya elemen TIK tidak serta merta dapat memberikan dampak yang signifikan pada perbaikan kualitas hidup perkotaan (Meijer & Bolívar, 2016). Perlu adanya inovasi dan kolaborasi dalam pelaksanaannya dan yang tidak kalah penting orientasi pembangunan haruslah tetap pada manusia (humanis) dan keberlanjutan ekosistem perkotaan (Russell, n.d.).

Penekanan pada inovasi dan kolaborasi inilah yang kemudian diadopsi pada penerapan smart city di Indonesia (Rizkinaswara, 2020). Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) bersama dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas), serta Kantor Staf Kepresidenan menyusun konsep smart city nasional dan menargetkan penerapannya di 100 kota di Indonesia. Seiring dengan suksesnya program tersebut di tahun 2017, maka penerapan smart city ditargetkan kembali ke banyak kota lainnya di Indonesia. Pada tahun 2023, tercatat sudah lebih dari 200 kabupaten/kota yang telah menyusun Master Plan Smart City Kota/Kabupaten.

Kabupaten Luwu merupakan salah satu kabupaten yang pada tahun 2023 berkesempatan untuk mendapatkan pendampingan dari Kominfo untuk menyusun master plan smart city. Terpilihnya Kabupaten Luwu setelah melalui serangkaian penilaian awal di tahun sebelumnya.

Kabupaten Luwu merupakan kabupaten lama yang kemudian terpecah menjadi 5 (lima) kabupaten/kota. Pusat pemerintahannya pun juga akhirnya berpindah dari Kota Palopo (yang menjadi kota administrasi) ke Kota Belopa. Perkembangan Kota Belopa pada beberapa tahun terakhir mengalami peningkatan yang positif. Hal ini didukung dengan semakin baiknya jaringan transportasi lintas Sulawesi yang melalui kota ini. Dengan lokasi yang strategis, pengembangan kawasan perkotaan yang terkendali merupakan sebuah keharusan.

Dalam sebuah sistem ruang wilayah, Kota Belopa hanyalah satu dari sekian banyak pusat kegiatan yang ada di Kabupaten Luwu. Wilayah yang sangat luas mencapai 3.000,25 km<sup>2</sup>, menuntut adanya beberapa pusat kegiatan yang tersebar di wilayah Kabupaten Luwu. Sebaran pusat kegiatan memungkinkan potensi-potensi wilayah yang dimiliki dapat berkembang. Komunikasi dan koordinasi antarbagian wilayah harus dilakukan secara kesinambungan, efektif, dan efisien guna mencapai pembangunan yang merata. Penerapan konsep smart city di Kabupaten Luwu dapat menjadi salah satu solusi untuk mencapai tujuan tersebut. Inovasi dan kerjasama semua pihak diharapkan dapat memaksimalkan potensi-potensi yang ada untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi oleh Kabupaten Luwu.

## **1.2 MAKSUD DAN TUJUAN**

Penerapan konsep smart city di Kabupaten Luwu diawali dengan penyusunan master plan smart city Kabupaten Luwu. Adapun maksud dari rangkaian kegiatan ini adalah untuk menyediakan pedoman yang nantinya digunakan dalam penerapan smart city di Kabupaten Luwu. Pedoman ini nantinya diharapkan dapat dijalankan secara sinkron dengan rencana pembangunan daerah dan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Luwu.

Adapun tujuan dari disusunnya dokumen Master Plan Smart City Kabupaten Luwu adalah sebagai berikut:

1. Memberikan gambaran mengenai arah penerapan smart city di Kabupaten Luwu
2. Menyusun visi, misi, sasaran, beserta dasar pemikiran pemilihan sasaran
3. Memberikan gambaran kesinambungan antara dokumen rencana pembangunan kabupaten dengan konsep smart city di Kabupaten Luwu.
4. Menyusun strategi dan indikator utama pelaksanaan penerapan konsep smart city di Kabupaten Luwu
5. Menyusun peta jalan program dan kegiatan inovasi-inovasi rencana pembangunan dalam rangka penerapan konsep smart city di Kabupaten Luwu
6. Menyusun rencana aksi penerapan inovasi-inovasi yang telah disusun terkait dengan penerapan konsep smart city di Kabupaten Luwu

Sebagai catatan, penerapan konsep smart city di Kabupaten Luwu bukanlah suatu satuan yang terpisah, melainkan harus dilakukan selaras dan berkesinambungan dengan rencana pembangunan dan rencana tata ruang wilayah di Kabupaten Luwu.

### **1.3 LANDASAN HUKUM**

Dalam pelaksanaannya, penyusunan master plan smart city Kabupaten Luwu didasari oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku baik secara nasional maupun peraturan perundangan di tingkat lokal Kabupaten Luwu. Adapun landasan hukum pelaksanaan penyusunan Master Plan Smart City di Kabupaten Luwu adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
4. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah No.34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Perkotaan;

9. Peraturan Pemerintah No.13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2022 tentang Perkotaan;
11. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
12. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
14. Peraturan Pemerintah No.50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025;
15. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
16. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;
17. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
18. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak;
19. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 13 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Komunikasi dan Informatika;
20. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

22. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2005-2025;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Tahun 2011-2031;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 019 rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024;
26. Keputusan Bupati Luwu Nomor 104/IV/2023 tentang Pembentukan Dewan Kota Cerdas (Smart City) Kabupaten Luwu
27. Keputusan Bupati Luwu tentang Pembentukan Tim Pelaksana Gerakan Menuju Kota Cerdas (Smart city) Kabupaten Luwu

#### **1.4 KERANGKA PIKIR**

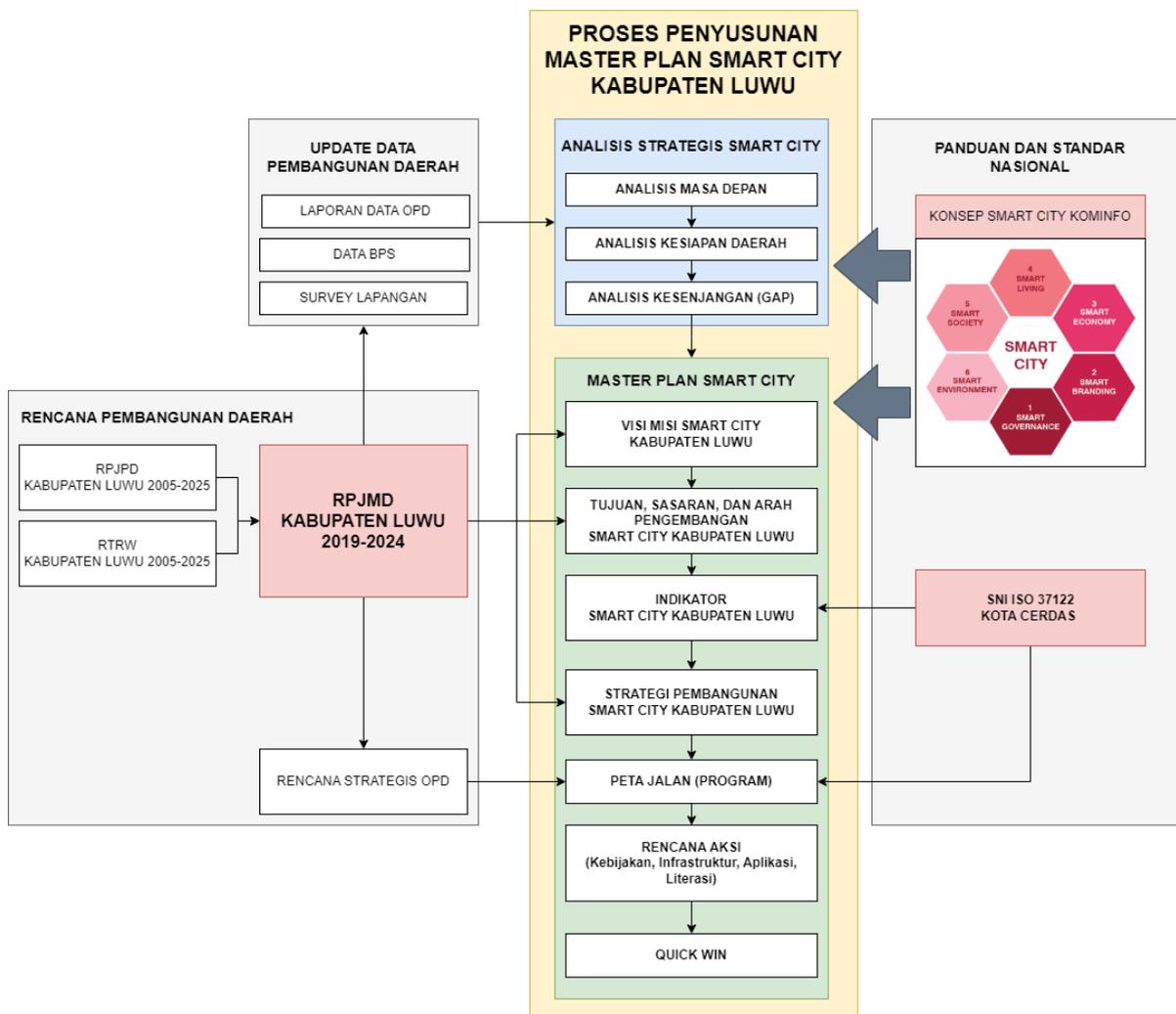
Kerangka pikir disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan penyusunan master plan smart city di Kabupaten Luwu. Kerangka pikir akan membantu konsistensi mulai dari sisi perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kegiatan (franz). Untuk itu, kerangka pikir harus jelas memuat semua komponen yang digunakan baik dari sisi teori maupun data yang digunakan (konig).

Berikut ini adalah gambar yang menunjukkan kerangka pikir dalam penyusunan Master Plan Smart City Kabupaten Luwu. Dari gambar tersebut terlihat bahwa proses penyusunan ini terdiri dari 2 (dua) tahapan utama, yaitu: tahapan analisis dan tahapan penyusunan dokumen master plan.

##### **Tahap 1 – Analisis Strategis Smart City**

Pada tahapan ini dilakukan analisis untuk melihat kesiapan Kabupaten Luwu dalam penerapan konsep smart city nasional di wilayahnya. Analisis ini terdiri dari analisis masa depan, analisis kesiapan daerah, hingga analisis kesenjangan. Meskipun banyak menyarikan dari rencana pembangunan, namun pembaruan terhadap data merupakan hal yang penting dilakukan. Pembaruan ini karena rencana pembangunan yang digunakan saat ini, RPJMD Kabupaten Luwu memiliki periode antara 2019-2024. Artinya, data analisis awal yang digunakan adalah data tahun 2018. Untuk itu, perlu dilakukan pembaruan data agar hasil analisis

merepresentasikan kondisi saat ini. Di tahap ini, analisis sudah mulai dihubungkan dengan dimensi smart city.



**Gambar 1 Kerangka Pikir Penyusunan Master Plan Smart City Kabupaten Luwu**

*Sumber: Analisis Tim, 2023*

### Tahap 2 – Penyusunan Master Plan Smart City

Setelah melakukan analisis kesiapan, proses penyusunan dilanjutkan ke bagian master plan smart city. Pada tahapan ini, hasil analisis kesiapan dijadikan dasar dalam menyusun visi, misi, sasaran, dan strategi smart city Kabupaten Luwu. Seperti, proses perencanaan pada umumnya, visi, misi, sasaran, dan strategi ini kemudian diturunkan ke dalam program-program strategis yang ingin dikembangkan untuk menjawab permasalahan smart city di Kabupaten Luwu.

Peta jalan dan rencana aksi penjabaran secara detil terhadap program-program yang ingin dikembangkan. Pada bagian ini, rencana strategis masing-masing OPD menjadi bagian penting untuk memberikan gambaran anggaran dan proyeksi pengembangan rencana. SNI ISO 37122 tentang kota cerdas dapat digunakan untuk melengkapi indikator-indikator yang belum dimuat dalam rencana strategis OPD. Ini sekaligus sebagai Upaya untuk menunjukkan bahwa master plan smart city Kabupaten Luwu tetap sejalan dengan panduan dan standar smart city nasional. Bagian paling akhir dari master plan ini adalah disepakatinya program quick win yang akan menjadi unggulan Kabupaten Luwu dan diprioritaskan untuk diimplementasikan di jangka pendek hingga menengah.

Berdasarkan kerangka pikir di atas, dapat dilihat bagaimana rencana pembangunan, dalam hal ini RPJMD Kabupaten Luwu, memiliki peran penting dalam penyusunan master plan smart city Kabupaten Luwu. Ini menunjukkan bahwa rencana penerapan konsep smart city di Kabupaten Luwu ini selaras dengan rencana pembungan Kabupaten Luwu yang sudah disusun sebelumnya.



# 2

---

## ARAH PEMBANGUNAN SMART CITY

KABUPATEN LUWU

Bab ini merupakan pokok gagasan dalam Master Plan Smart City Kabupaten Luwu sehingga memberikan arahan atau dasar dalam penentuan langkah strategis mewujudkan smart city Kabupaten Luwu.

## **2.1 VISI, MISI, DAN SASARAN SMART CITY**

Proses penyusunan visi, misi, dan sasaran smart city Kabupaten Luwu sudah dibahas pada bagian akhir dokumen analisis kesiapan smart city Kabupaten Luwu. Secara umum penentuan visi, misi, dan sasaran smart city Kabupaten Luwu tidak lepas dari visi, misi, dan sasaran pembangunan Kabupaten Luwu, baik pembangunan jangka panjang maupun pembangunan jangka menengah. Hal ini untuk memastikan bahwa semua unsur pembangunan di Kabupaten Luwu berjalan secara berkelanjutan. Beberapa perubahan dilakukan untuk menyesuaikan dengan konsep smart city nasional.

### **2.1.1 Visi Smart City Kabupaten Luwu**

Visi smart city Kabupaten Luwu disusun dengan tetap mempertahankan beberapa butir utama pada visi rencana pembangunan Kabupaten Luwu. Penambahan beberapa kata kunci dilakukan untuk memastikan bahwa visi yang disusun dapat menggambarkan tujuan penerapan konsep smart city di Kabupaten Luwu. Penentuan visi ini juga dilakukan dengan memperhatikan aspirasi dari seluruh peserta yang terlibat dalam penyusunan Master Plan Smart City Kabupaten Luwu. Adapun visi smart city Kabupaten Luwu adalah sebagai berikut:

---

## **“LUWU MENUJU SMART CITY YANG BERKELANJUTAN DALAM NUANSA RELIGI”**

---

Adapun penjabaran dari masing-masing pokok pikiran dari visi tersebut adalah

**MENUJU SMART CITY** berarti Kabupaten Luwu saat ini berada pada proses menuju menjadi smart city, salah satunya dengan menyusun master plan smart city Kabupaten Luwu yang berisikan mengenai program-program yang mendukung pencapaian Kabupaten Luwu sebagai smart city. Menuju menunjukkan upaya-upaya yang dilakukan Kabupaten Luwu untuk mencapai smart city Kabupaten Luwu.

**BERKELANJUTAN** berarti bahwa program dan kegiatan yang dilaksanakan tidak hanya harus berjalan dalam jangka panjang tetapi juga berkaitan dengan program pembangunan dari tahun sebelumnya maupun periode pemerintahan sebelumnya yang memiliki potensi ataupun yang sudah berjalan dengan baik. Selain itu, berkelanjutan yang dimaksud tidak hanya berkaitan dengan lingkungan, tetapi juga kearifan lokal dan budaya yang ada di Kabupaten Luwu.

**DALAM NUANSA RELIGI** maksudnya adalah kehidupan masyarakat Kabupaten Luwu yang mengamalkan nilai-nilai agama dan budaya, yang tercermin dalam tatanan kehidupan masyarakat yang aman, tentram, dan nyaman. Lebih lanjut, dalam nuansa religi berarti segala bentuk pelayanan yang diberikan dalam menjalankan program semuanya didasarkan pada nilai-nilai religi.

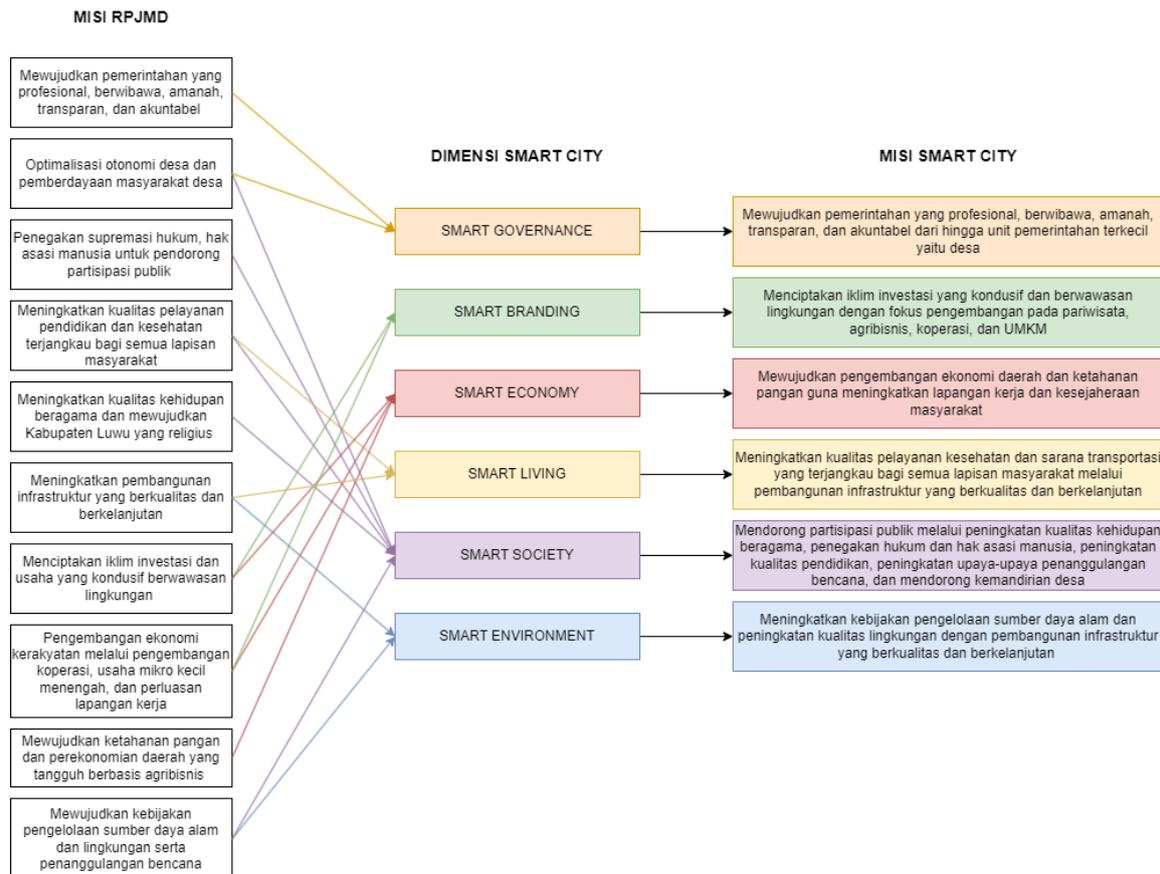
### 2.1.2 Misi Smart City Kabupaten Luwu

Untuk mencapai visi dari smart city Kabupaten Luwu, maka disusun misi-misi yang juga disarikan dari misi-misi rencana pembangunan Kabupaten Luwu. Dalam prosesnya, misi rencana pembangunan yang dimuat dalam RPJMD Kabupaten Luwu dipetakan berdasarkan dimensi smart city untuk kemudian diinterpretasikan dan disusun kembali untuk memudahkan tahap selanjutnya dalam menyusun sasaran, strategi, dan indikator utama smart city Kabupaten Luwu.

Berikut adalah misi smart city Kabupaten Luwu yang telah diinterpretasikan berdasarkan dimensi smart city berdasarkan misi rencana pembangunan Kabupaten Luwu.

- 1 Mewujudkan pemerintahan yang profesional, berwibawa, amanah, transparan, dan akuntabel dari hingga unit pemerintahan terkecil yaitu desa (*smart governance*)
- 2 Menciptakan iklim investasi yang kondusif dan berwawasan lingkungan dengan fokus pengembangan pada pariwisata, agribisnis, koperasi, dan UMKM (*smart branding*)
- 3 Mewujudkan pengembangan ekonomi daerah dan ketahanan pangan guna meningkatkan lapangan kerja dan kesejahteraan masyarakat (*smart economy*)
- 4 Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan sarana transportasi yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan (*smart living*)

- 5 Mendorong partisipasi publik melalui peningkatan kualitas kehidupan beragama, penegakan hukum dan hak asasi manusia, peningkatan kualitas pendidikan, peningkatan upaya-upaya penanggulangan bencana, dan mendorong kemandirian desa (*smart society*)
- 6 Meningkatkan kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan peningkatan kualitas lingkungan dengan pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan (*smart environment*)



**Gambar 2 Proses Interpretasi Misi Smart City dari Misi RPJMD Kabupaten Luwu 2019-2024**

*Sumber: Analisis Tim, 2023*

### 2.1.3 Sasaran Smart City Kabupaten Luwu

Sasaran smart city Kabupaten Luwu diturunkan dari misi smart city Kabupaten Luwu yang kemudian disesuaikan dengan subdimensi smart city. Beberapa sasaran yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Luwu digunakan untuk kemudian dilengkapi dengan beberapa sasaran yang dibuat untuk menjawab isu-isu yang muncul di sesi diskusi saat pelaksanaan Bimbingan Teknis Kabupaten Luwu I.

**Tabel 1 Pemetaan Misi, Subdimensi, dan Sasaran Smart City**

MISI DAN DIMENSI	SUBDIMENSI	SASARAN SMART CITY	DASAR PEMIKIRAN
<b>MISI 1</b> Mewujudkan pemerintahan yang profesional, berwibawa, amanah, transparan, dan akuntabel dari hingga unit pemerintahan terkecil yaitu desa ( <i>smart governance</i> )	G.1 Pelayanan Publik	G.1.1 Terwujudnya peningkatan kualitas layanan publik	Mengoptimalkan kualitas pelayanan publik yang selama ini masih belum optimal (pemetaan isu Bimtek 1)
	G.2 Birokrasi yang Efisien	G.2.1 Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Sesuai dengan Sasaran RPJMD M1.T1.S1:  <i>Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah dengan indikator Nilai SAKIP Kabupaten</i>
	G.3 Kebijakan Publik	G.3.1. Terwujudnya sistem informasi kebijakan pemerintah yang dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat	Meningkatkan keterbukaan informasi kebijakan yang ada kepada masyarakat (pemetaan isu Bimtek 1)
<b>MISI 2</b>	B.1 Ekosistem Pariwisata	B.1.1 Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara	Menjawab isu kurang berkembangnya pariwisata di Kabupaten Luwu (Bimtek 1)

MISI DAN DIMENSI	SUBDIMENSI	SASARAN SMART CITY	DASAR PEMIKIRAN
Menciptakan iklim investasi yang kondusif dan berwawasan lingkungan dengan fokus pengembangan pada pariwisata, agribisnis, koperasi, dan UMKM ( <i>smart branding</i> )	B.2 Ekosistem Bisnis	B.2.1 Meningkatnya kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah	Sesuai dengan Sasaran RPJMD M5.T5.S5: <i>Meningkatkan kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah</i>  Dan menjawab potensi dan keinginan masyarakat untuk mengembangkan sektor pertanian sebagai sektor unggulan di Kabupaten Luwu (BIMTEK 1)
	B.3 Wajah Kota	B.3.1 Terwujudnya wajah Kabupaten Luwu yang berkarakter	Kabupaten Luwu sudah memiliki branding yang cukup kuat dalam hal pertanian (pemetaan potensi daerah BIMTEK 1), namun belum muncul karakter yang kuat dalam merepresentasikan branding tersebut pada wajah Kabupaten Luwu
<b>MISI 3</b>	Ec.1 Industri yang Berdaya Saing	Ec.1.1 Meningkatnya kuantitas dan kualitas sektor pengolahan	Sesuai dengan Sasaran RPJMD M8.T8.S8.1:

MISI DAN DIMENSI	SUBDIMENSI	SASARAN SMART CITY	DASAR PEMIKIRAN
Mewujudkan pengembangan ekonomi daerah dan ketahanan pangan guna meningkatkan lapangan kerja dan kesejahteraan masyarakat ( <i>smart economy</i> )			<p><i>Meningkatkan kuantitas dan kualitas industri pengolahan</i></p> <p>Juga menjawab keinginan masyarakat agar produk pertanian dapat diolah lebih lanjut untuk meningkatkan nilai tambah</p>
	Ec.2 Kesejahteraan Rakyat	Ec.2.1 Meningkatnya kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah	<p>Sesuai dengan Sasaran RPJMD M5.T5.S5.1:</p> <p><i>Meningkatkan kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah</i></p>
		Ec.2.2 Meningkatnya pendapatan masyarakat	<p>Sesuai dengan Sasaran RPJMD M4.T4.S4.1:</p> <p><i>Meningkatkan pendapatan masyarakat</i></p>
	Ec. 3 Ekosistem Transaksi Keuangan	Ec.3.1 Terwujudnya kemudahan akses perbankan guna meningkatkan kuantitas dan kualitas industri	<p>Sesuai dengan Sasaran RPJMD M8.T8.S8.1:</p>

MISI DAN DIMENSI	SUBDIMENSI	SASARAN SMART CITY	DASAR PEMIKIRAN
			<p><i>Meningkatkan kuantitاس dan kualitas industri pengolahan</i></p> <p>dan pemetaan isu di Bimtek 1 terkait kurangnya daya saing industri dalam perkembangan e-commerce</p>
<p><b>MISI 4</b></p> <p>Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan sarana transportasi yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan (<i>smart living</i>)</p>	Lv.1 Harmonisasi Tata Ruang	Lv.1.1 Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman	Sesuai dengan Sasaran RPJMD M3.T3.S3.2:  <i>Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman</i>
	Lv.2 Prasarana Kesehatan	Lv.2.1 Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Sesuai dengan Sasaran RPJMD M2.T2.S2.2:  <i>Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat</i>
	Lv. 3 Sarana Transportasi	Lv.3.1 Meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas wilayah	Sesuai dengan Sasaran RPJMD M3.T3.S3.1:  <i>Meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas wilayah</i>

MISI DAN DIMENSI	SUBDIMENSI	SASARAN SMART CITY	DASAR PEMIKIRAN
<b>MISI 5</b> Mendorong partisipasi publik melalui peningkatan kualitas kehidupan beragama, penegakan hukum dan hak asasi manusia, peningkatan kualitas pendidikan, peningkatan upaya-upaya penanggulangan bencana, dan mendorong kemandirian desa ( <i>smart society</i> )	S.1 Interaksi Komunitas	S.1.1 Terwujudnya kesadaran masyarakat dalam mengenal dan mencintai budaya lokal	Menjawab isu kurangnya perhatian masyarakat dalam pelestarian dan pengembangan budaya lokal (Bimtek 1)
	S.2 Ekosistem Belajar	S.2.1 Terwujudnya peningkatan derajat pendidikan masyarakat	Sesuai dengan Sasaran RPJMD M2.T2.S2.1 <i>Meningkatkan derajat pendidikan masyarakat</i>
	S.3 Sistem Keamanan Masyarakat	S.3.1 Terwujudnya kehidupan sosial yang berkualitas	Sesuai dengan misi pembangunan Kabupaten Luwu yang mengamanatkan untuk meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan perlindungan hak asasi manusia
<b>MISI 6</b> Meningkatkan kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan peningkatan	En.1 Proteksi Lingkungan	En.1.1 Meningkatnya kualitas lingkungan yang berkelanjutan	Sesuai dengan Sasaran RPJMD M3.T3.S3.2: <i>Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman</i>

MISI DAN DIMENSI	SUBDIMENSI	SASARAN SMART CITY	DASAR PEMIKIRAN
kualitas lingkungan dengan pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan ( <i>smart environment</i> )	En.2 Pengelolaan Limbah dan Sampah	En.2.1 Tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan limbah terpadu	Menjawab isu lingkungan yang dijabarkan dalam Bimtek 1 dimana salah satunya adalah kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah dan limbah
	En.3 Tata Kelola Energi	En.3.1 Tersedianya kebijakan pengelolaan energi alternatif terbarukan dan berkelanjutan	Masalah persampahan merupakan salah satu masalah yang cukup serius di Kabupaten Luwu (Bimtek 1) yang harus dapat diselesaikan dengan efektif dan memerlukan alternatif penanganan selain membuang ke TPA, salah satunya menjadi energi terbarukan yang ramah lingkungan (sekaligus dapat mendukung pencapaian target Paris Agreement mengenai emisi karbon)

Sumber: Analisis Tim, 2023

## 2.2 INDIKATOR UTAMA SMART CITY KABUPATEN LUWU

Indikator utama merupakan tolok ukur yang ditetapkan untuk menilai capaian sasaran smart city Kabupaten Luwu. Penetapan indikator utama disesuaikan dengan subdimensi smart city dan sasaran yang telah disusun di subbab sebelumnya. Ada 2 (dua) tahapan yang dilakukan untuk menentukan indikator utama dari masing-masing sasaran. Pada tahap I, indikator disarikan dari RPJMD Kabupaten Luwu 2019-2024. Pada tahap ini, tidak semua sasaran dapat diakomodir dengan indikator utama RPJMD Kabupaten Luwu 2019-2024. Untuk itu, proses dilanjutkan pada tahap II dimana indikator utama diambil dari SNI ISO 37122 tentang kota cerdas. Beberapa indikator utama dari RPJMD Kabupaten Luwu 2019-2024 juga disandingkan dengan SNI ISO 37122 guna melihat keselarasan antara rencana pembangunan Kabupaten Luwu dengan standar smart city nasional.

### 2.2.1 Indikator Utama Smart Governance

Misi rencana pembangunan Kabupaten Luwu cukup jelas mengamankan peningkatan kualitas pelayanan publik di sektor pemerintahan. Oleh karena itu, sudah cukup banyak indikator dari RPJMD Kabupaten Luwu 2019-2024 yang memuat sasaran untuk mencapai tata pemerintahan yang cerdas. Berikut adalah indikator utama pada dimensi smart governance.

**Tabel 2 Indikator Utama Smart Governance Kabupaten Luwu**

SUBDIMENSI	SASARAN	INDIKATOR UTAMA	
		TAHAP I (RPJMD)	TAHAP II (SNI ISO 37122)
G.1 Pelayanan Publik	G.1.1 Terwujudnya peningkatan kualitas layanan publik	Indeks kepuasan pelayanan perizinan	SNI 10.1 Jumlah kunjungn daring tahunan ke portal data terbuka per 100.000 penduduk
		Cakupan kasus hukum yang difasilitasi	
		Perekaman KTP elektronik	SNI 10.2 Persentase layanan yang dapat diakses dan diminta secara daring
		Rasio pasangan berakte nikah	
		Warga yang memperoleh	

SUBDIMENSI	SASARAN	INDIKATOR UTAMA	
		TAHAP I (RPJMD)	TAHAP II (SNI ISO 37122)
		layanan informasi bencana	SNI 10.3 Rata-rata waktu respon terhadap pertanyaan yang dilakukan melalui sistem penyelidikan non-darurat (hari)
		Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	
		Persentase kemandirian desa	
		Indeks kepuasan masyarakat atas penegakan hukum	
G.2 Birokrasi yang Efisien	G.2.1 Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Laporan hasil pemeriksaan BPK	SNI 6.3 Jumlah tingkat pendidikan tinggi sains, teknologi, teknik, dan matematika (STEM) per 100.000 penduduk
		Nilai LPPD	
		Nilai SAKIP	
		Indeks reformasi birokrasi	
G.3 Kebijakan Publik	G.3.1. Terwujudnya sistem informasi kebijakan pemerintah yang dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat	Tingkat capaian target perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah	SNI 5.1 Persentase kontrak layanan yang menyediakan layanan yang memuat kebijakan data terbuka
		Tingkat capaian pelaksanaan kebijakan	SNI 10.1 Jumlah kunjungan daring tahunan ke portal data terbuka per 100.000 penduduk
			SNI 10.3 Rata-rata respons terhadap pertanyaan yang dilakukan melalui sistem penyelidikan non-darurat (hari)

Sumber: Analisis Tim, 2023

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa ada satu sasaran yang tidak dimuat dalam RPJMD Kabupaten Luwu 2019-2024, yaitu dalam hal mewujudkan kebijakan pemerintah yang dapat diakses publik. Hal ini karena Pemerintah Kabupaten Luwu belum menaruh perhatian pada sasaran tersebut. Untuk itu, indikator dari SNI ISO 37122 melengkapi indikator tersebut. Ada 3 (tiga) indikator dari SNI yang cocok untuk menjadi tolok ukur capaian sasaran tersebut.

**2.2.2 Indikator Utama Smart Branding**

Smart branding erat kaitannya dengan pariwisata, investasi daerah, dan karakter wilayah. Kondisi ini belum menjadi perhatian serius bagi Pemerintah Kabupaten Luwu, terutama pada pengembangan ekosistem daerah dan branding karakter wilayah. Padahal selama ini Kabupaten Luwu cukup dikenal pada bidang agribisnisnya. Namun, potensi tersebut belum banyak dikembangkan untuk memperkuat citra Kabupaten Luwu. Berikut adalah indikator-indikator yang digunakan menjadi parameter capaian sasaran pada smart branding Kabupaten Luwu.

**Tabel 3 Indikator Utama Smart Branding Kabupaten Luwu**

SUBDIMENSI	SASARAN	INDIKATOR UTAMA	
		TAHAP I (RPJMD)	TAHAP II (SNI ISO 37122)
B.1 Ekosistem Pariwisata	B.1.1 Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara		<p>SNI 14.1 Persentase layanan rekreasi publik yang dapat dipesan secara daring</p> <p>SNI 17.1 Jumlah pesanan daring untuk fasilitas budaya per 100.000 penduduk</p> <p>SNI 18.3 Persentase area yang dicakup oleh konektivitas internet yang disediakan kota</p>

SUBDIMENSI	SASARAN	INDIKATOR UTAMA	
		TAHAP I (RPJMD)	TAHAP II (SNI ISO 37122)
B.2 Ekosistem Bisnis	B.2.1 Meningkatnya kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah	Peningkatan investasi	SNI 5.2 Tingkat kelangsungan bisnis baru per 100.000 penduduk
		Cakupan penyelenggaraan promosi penanaman modal	
		Persentase kecamatan yang telah memiliki sarana distribusi perdagangan	
B.3 Wajah Kota	B.3.1 Terwujudnya wajah Kabupaten Luwu yang berkarakter		SNI 17.2 Persentase catatan budaya yang telah didigitalkan

Sumber: Analisis Tim, 2023

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, pengembangan ekosistem pariwisata dan wajah daerah belum dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten Luwu pada periode rencana pembangunan ini. Hal itu berdampak dari tidak adanya indikator dari RPJMD Kabupaten Luwu 2019-2024 yang bisa menjadi tolok ukur keberhasilan sasaran yang ditetapkan dalam subdimensi ini. Indikator-indikator kemudian disarikan dari SNI ISO 37122 dimana indikator ditekankan pada peningkatan kunjungan wisatawan dan catatan budaya yang dilestarikan dengan didigitalkan.

### 2.2.3 Indikator Utama Smart Economy

Smart economy Kabupaten Luwu berfokus pada peningkatan industri pengolahan dari sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Diharapkan dengan adanya peningkatan kapasitas di bidang ini, akan memunculkan lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan di Kabupaten Luwu. Namun, peningkatan ini memerlukan

dukungan dari Pemerintah Kabupaten Luwu berupa kemudahan dalam akses ke perbankan guna memudahkan ekspansi bisnis.

**Tabel 4 Indikator Utama Smart Economy Kabupaten Luwu**

SUBDIMENSI	SASARAN	INDIKATOR UTAMA	
		TAHAP I (RPJMD)	TAHAP II (SNI ISO 37122)
Ec.1 Industri yang Berdaya Saing	Ec.1.1 Meningkatnya kuantitas dan kualitas sektor pengolahan	Usaha mikro menjadi wirausaha	SNI 5.2 Tingkat kelangsungan bisnis baru per 100.000 penduduk
Ec.2 Kesejahteraan Rakyat	Ec.2.1 Meningkatnya kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah	Pertumbuhan PDRB pertanian	SNI 20.1 Persentase tahunan dari anggaran yang dihabiskan untuk inisiatif pertanian
		Angka kemiskinan	SNI 5.3 Persentase Angkatan kerja yang bekerja di sektor TIK
	SNI 5,4 Persentase Angkatan kerja yang bekerja di sektor pendidikan, penelitian, dan pengembangan		
	Ketersediaan pangan		SNI 20.3 Persentase luas tanah yang dicakup oleh sistem pemetaan pemasok makanan daring
		Tingkat konsumsi protein	

SUBDIMENSI	SASARAN	INDIKATOR UTAMA	
		TAHAP I (RPJMD)	TAHAP II (SNI ISO 37122)
Ec. 3 Ekosistem Transaksi Keuangan	Ec.3.1 Terwujudnya kemudahan akses perbankan guna meningkatkan kuantitas dan kualitas industri		SNI 9.2 Persentase pembayaran yang dibayar secara elektronik berdasarkan faktur elektronik

Sumber: Analisis Tim, 2023

Kebutuhan industri terhadap akses perbankan selama ini belum terfasilitasi dalam RPJMD Kabupaten Luwu 2019-2024. Hal ini mengakibatkan tidak adanya indikator yang berhubungan dengan isu ini dalam RPJMD Kabupaten Luwu. Oleh karena itu, salah satu indikator dari SNI ISO 37122 yang dapat digunakan sebagai tolok ukur ini adalah mengenai transaksi yang dilakukan secara elektronik.

### 2.2.4 Indikator Utama Smart Living

Smart living Kabupaten Luwu sudah cukup menjadi perhatian dalam rencana pembangunan Kabupaten Luwu. Hal ini terlihat dari indikator-indikator mengenai dimensi ini yang sudah banyak dimuat dalam RPJMD Kabupaten 2019-2023. Berikut adalah indikator-indikator yang digunakan sebagai tolok ukur capaian smart living Kabupaten Luwu

**Tabel 5 Indikator Utama Smart Living Kabupaten Luwu**

SUBDIMENSI	SASARAN	INDIKATOR UTAMA	
		TAHAP I (RPJMD)	TAHAP II (SNI ISO 37122)
Lv.1 Harmonisasi Tata Ruang	Lv.1.1 Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman	Irigasi dalam kondisi baik	SNI 20.1 Persentase tahunan dari anggaran yang dihabiskan untuk inisiatif pertanian
		Rumah tangga dengan saluran air minum	SNI 23.3 Persentase jaringan distribusi air yang dipantau oleh air cerdas sistem

SUBDIMENSI	SASARAN	INDIKATOR UTAMA	
		TAHAP I (RPJMD)	TAHAP II (SNI ISO 37122)
		Kawasan kumuh di bawah 10 Ha yang ditangani	SNI 21.1 Jumlah warga per 100.000 penduduk per tahun yang terlibat dalam proses perencanaan
		Perumahan dilengkapi dengan PSU	
		Ketaatan RTRW	
Lv.2 Prasarana Kesehatan	Lv.2.1 Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Indikator SPM yang dapat dicapai sesuai target	SNI 11.1 Persentase populasi yang masuk dalam file kesehatan terpadu daring yang dapat diakses oleh penyedia layanan kesehatan  SNI 11.2 Jumlah janji temu medis tahunan yang dilakukan melalui jarak jauh per 100.000 penduduk
		Puskesmas yang memiliki tenaga kesehatan sesuai standar	
		Pemenuhan sediaan farmasi	
Lv. 3 Sarana Transportasi	Lv.3.1 Meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas wilayah	Tingkat kemantapan jalan	SNI 19.1 Persentase jalan umum dan jalan berbayar yang dicakup oleh peringatan dan informasi lalu lintas daring langsung (real-time)  SNI 19.5 Persentase jalur transportasi umum
		Rasio konektivitas angkutan jalan	
		Tingkat mobilitas	

SUBDIMENSI	SASARAN	INDIKATOR UTAMA	
		TAHAP I (RPJMD)	TAHAP II (SNI ISO 37122)
			<p>yang dilengkapi dengan sistem langsung (real-time) yang dapat diakses publik</p> <p>SNI 19.6 Persentase layanan transportasi umum yang dicakup oleh sistem layanan terpadu</p> <p>SNI 19.8 Persentase ruang parkir umum yang dilengkapi dengan sistem ketersediaan parkir</p> <p>SNI 19.12 Persentase rute angkutan umum dengan konektivitas internet yang disediakan dan/atau dikelola oleh komuter</p> <p>SNI 19.14 Persentase armada bus kota yang digerakkan dengan motor</p>

Sumber: Analisis Tim, 2023

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa semua semua sasaran yang ditetapkan pada masing-masing subdimensi sudah termuat dalam RPJMD Kabupaten Luwu 2019-2024. Untuk itu, indikator-indikator SNI yang dicantumkan dalam tabel di atas lebih untuk menunjukkan keselarasan rencana pembangunan dengan master plan

smart city dan bersifat sebagai pelengkap indikator-indikator yang sudah ada di RPJMD Kabupaten Luwu 2019-2024.

### 2.2.5 Indikator Utama Smart Society

Kondisi sosial masyarakat merupakan salah satu fokus pembangunan Kabupaten Luwu. Hal ini terlihat dari banyaknya indikator yang telah dimuat dalam RPJMD Kabupaten Luwu 2019-2024 yang terkait dengan dimensi smart society. Berikut adalah indikator-indikator yang berkaitan dengan smart society di Kabupaten Luwu.

**Tabel 6 Indikator Utama Smart Society Kabupaten Luwu**

SUBDIMENSI	SASARAN	INDIKATOR UTAMA	
		TAHAP I (RPJMD)	TAHAP II (SNI ISO 37122)
S.1 Interaksi Komunitas	S.1.1 Terwujudnya kesadaran masyarakat dalam mengenal dan mencintai budaya lokal	Kebudayaan masyarakat yang dilestarikan	SNI 17.2 Persentase catatan budaya yang telah didigitalkan
		Indeks Kerukunan Umat	SNI 15.1 Persentase area yang dicakup oleh kamera pengintai digital
S.2 Ekosistem Belajar	S.2.1 Terwujudnya peningkatan derajat pendidikan masyarakat	Tingkat partisipasi usia 5-6 tahun dalam pendidikan	SNI 17.4 Persentase populasi yang merupakan pengguna perpustakaan umum yang aktif
		Tingkat partisipasi usia 7-12 tahun dalam pendidikan	
		Tingkat partisipasi usia 13-15 tahun dalam pendidikan	
		Guru yang memenuhi kualifikasi	SNI 13.4 Persentase anggaran kota yang dialokasikan

SUBDIMENSI	SASARAN	INDIKATOR UTAMA	
		TAHAP I (RPJMD)	TAHAP II (SNI ISO 37122)
			untuk penyediaan program yang ditujukan untuk menjembatani kesenjangan digital
S.3 Sistem Keamanan Masyarakat	S.3.1 Terwujudnya kehidupan sosial yang berkualitas	Angka kriminalitas	SNI 15.1 Persentase area yang dicakup oleh kamera pengintai digital
		Anak terlantar yang ditangani	
		Gangguan trantibum yang dapat diatasi	
		Rasio kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi	SNI 11.3 Persentase populasi yang memiliki akses ke sistem peringatan public langsung ( <i>real-time</i> ) untuk sarana kualitas udara dan air
		Indeks risiko bencana	SNI 10.2 Persentase layanan yang dapat diakses dan diminta secara daring
		Korban bencana yang terpenuhi kebutuhannya dasarnya	

Sumber: Analisis Tim, 2023

Indikator-indikator yang dimuat dalam RPJMD Kabupaten Luwu 2019-2024 sebenarnya sudah cukup merepresentasikan parameter pencapaian sasaran yang disusun. Oleh karena itu, indikator pada kolom SNI ISO 37122 lebih bersifat sebagai pelengkap untuk indikator yang telah ada dan juga menunjukkan keselarasan antara indikator rencana pembangunan dengan indikator standar smart city nasional.

**2.2.6 Indikator Utama Smart Environment**

Smart environment merupakan salah satu dimensi yang juga kurang mendapatkan perhatian dari Pemerintah Kabupaten Luwu melalui rencana pembangunan periode ini. Hanya ada beberapa subdimensi dan sasaran yang terakomodir dari RPJMD Kabupaten Luwu 2019-2024. Salah satu subdimensi yang indikatornya tidak diakomodir dalam rencana pembangunan adalah pada subdimensi tata kelola energi.

Pada subdimensi proteksi lingkungan, sudah cukup banyak indikator yang dapat disarikan di tahap I. Sehingga, penambahan indikator dari SNI ISO 37122 dapat digunakan sebagai pelengkap atau menunjukkan keselarasan antara rencana pembangunan dan master plan smart city Kabupaten Luwu yang sedang disusun.

Pengelolaan limbah, baik limbah cair maupun limbah padat merupakan salah satu isu utama dalam pembangunan Kabupaten Luwu. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan limbah merupakan isu penting pada subdimensi ini. Selain itu, kurangnya sarana dan prasarana yang dapat mendukung program pengelolaan limbah menyebabkan rencana pengelolaan seringkali terhambat. Oleh karena itu, sasaran awal pengelolaan limbah adalah dengan menyediakan sarana dan prasarana yang memadai. Indikator yang disarikan dari SNI ISO 37122 bersifat sebagai pelengkap untuk indikator-indikator yang sudah tercantum dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.

**Tabel 7 Indikator Utama Smart Environment Kabupaten Luwu**

SUBDIMENSI	SASARAN	INDIKATOR UTAMA	
		TAHAP I (RPJMD)	TAHAP II (SNI ISO 37122)
En.1 Proteksi Lingkungan	En.1.1 Meningkatnya kualitas lingkungan yang berkelanjutan	Jalan yang memiliki drainase	SNI 8.2 Jumlah stasiun pemantauan kualitas udara jarak jauh secara langsung (real-time) per kilometer persegi (km <sup>2</sup> )  SNI 8.3 Persentase bangunan umum
		Indeks kualitas lingkungan	

SUBDIMENSI	SASARAN	INDIKATOR UTAMA	
		TAHAP I (RPJMD)	TAHAP II (SNI ISO 37122)
			yang dilengkapi untuk memantau kualitas udara dalam ruangan
		Indeks kualitas air	SNI 23.2 Jumlah stasiun pemantauan kualitas air lingkungan langsung (real-time) per 100.000 populasi
En.2 Pengelolaan Limbah dan Sampah	En.2.1 Tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan limbah terpadu	Persentase rumah tangga yang memperoleh layanan pengelolaan air limbah	SNI 22.1 Persentase air limbah olahan yang digunakan kembali  SNI 16.2 Persentase populasi yang memiliki pengumpulan sampah dari pintu ke pintu dengan pemantauan individu terhadap jumlah sampah rumah tangga
En.3 Tata Kelola Energi	En.3.1 Tersedianya kebijakan pengelolaan energi alternatif terbarukan dan berkelanjutan		SNI 5.1 Persentase kontrak layanan yang menyediakan layanan yang memuat kebijakan data terbuka

Sumber: Analisis Tim, 2023

Berbeda dengan subdimensi proteksi lingkungan dan pengelolaan limbah dan sampah, subdimensi tata kelola energi di Kabupaten Luwu lebih fokus pada

tersedianya dokumen lingkungan pertambangan. Pertambangan adalah salah satu potensi besar yang dimiliki oleh Kabupaten Luwu, namun eksplorasi tambang yang tidak diatur dengan baik akan menyebabkan masalah lainnya, seperti kerusakan lingkungan. Untuk itu, penyediaan dokumen menjadi hal yang sangat diperlukan sebagai kontrol terhadap usaha pertambangan. Indikator untuk sasaran ini sebenarnya tidak dibahas baik di pada RPJMD maupun SNI secara spesifik. Oleh karena itu, indikator SNI yang digunakan lebih pada keterbukaan informasi sehingga sekaligus dapat menjadi kontrol dari secara dua arah.

# 3

## STRATEGI PEMBANGUNAN SMART CITY

KABUPATEN LUWU

Strategi adalah langkah terukur yang berisikan program dalam mencapai sasaran yang diinginkan. Dalam penyusunan master plan smart city ini, strategi disusun berdasarkan sasaran yang sudah disusun dalam buku rencana strategis dan dimuat ulang dalam Bab 1. Strategi ini nantinya digunakan dalam penyusunan program dan kegiatan smart city di masing-masing dimensi.

### 3.1 STRATEGI SMART GOVERNANCE

Untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang cerdas, diperlukan beberapa strategi untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Smart governance Kabupaten Luwu menetapkan 6 (enam) sasaran yang dicapai dengan 7 (tujuh) strategi. Berikut adalah sasaran dan strategi yang ditetapkan untuk menerapkan smart governance di Kabupaten Luwu.

**Tabel 8 Strategi Pembangunan Smart Governance Kabupaten Luwu**

SUBDIMENSI	SASARAN	STRATEGI
G.1 Pelayanan Publik	G.1.1 Terwujudnya peningkatan kualitas layanan publik	G.1.1.1 Meningkatkan persentase pemenuhan data dokumen kependudukan
G.2 Birokrasi yang Efisien	G.2.1 Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	G.2.1.1 Meningkatkan inovasi pelayanan publik melalui pengembangan sumber daya manusia yang kompeten
G.3 Kebijakan Publik	G.3.1. Terwujudnya sistem informasi kebijakan pemerintah yang dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat	G.3.1.1 Meningkatkan pemahaman terhadap produk hukum daerah

*Sumber: Analisis Tim, 2023*

Strategi-strategi yang ditetapkan pada dimensi ini disarikan dari rencana pembangunan daerah yaitu RPJMD Kabupaten Luwu 2019-2024. Selain itu, strategi juga disusun dari analisis SWOT dan TOWS yang telah dilakukan sebelumnya pada tahapan analisis kesiapan daerah. Inovasi menjadi salah satu kunci untuk mencapai pelayanan publik yang berkualitas. Selain itu, ada strategi bottom-up yang digunakan pada smart governance Kabupaten Luwu, dimana hal

ini tergolong unik karena kecenderungan penerapan konsep smart city selama ini bersifat top-down. Caranya adalah dengan mendorong kemandirian desa dan pengoptimalkan potensi dan pemberdayaan masyarakat desa.

### 3.2 STRATEGI SMART BRANDING

Tidak banyak strategi untuk mencapai smart branding Kabupaten Luwu karena fokus smart branding yang selama ini hanyalah pada peningkatan iklim investasi. Untuk itu, untuk memastikan sasaran yang ditetapkan dapat tercapai dengan baik, hanya ada 4 (empat) strategi yang ditetapkan pada dimensi ini. Berikut adalah sasaran dan strategi yang diterapkan dalam guna mencapai smart branding Kabupaten Luwu.

**Tabel 9 Strategi Pembangunan Smart Branding Kabupaten Luwu**

SUBDIMENSI	SASARAN	STRATEGI
B.1 Ekosistem Pariwisata	B.1.1 Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara	B.1.1.1 Membangun dan mengembangkan destinasi wisata yang inklusif dan berkelanjutan
B.2 Ekosistem Bisnis	B.2.1 Meningkatnya kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah	B.2.1.1 Menghadirkan platform dashboard dan portal inventasi daerah yang informatif dan interaktif
B.3 Wajah Kota	B.3.1 Terwujudnya wajah Kabupaten Luwu yang berkarakter	B.3.1.1 Menjadikan tampilan Kabupaten Luwu yang menarik dan berkarakter
		B.3.1.2 Mengembangkan IKM Barimbing

*Sumber: Analisis Tim, 2023*

Fokus pengembangan smart branding adalah pada peningkatan karakter wilayah melalui pengaturan wajah atau karakteristik daerah. Ada 2 (dua) strategi yang digunakan, yaitu menjadikan tampilan Kabupaten Luwu yang menarik dan berkarakter dan mengembangkan IKM Barimimbang. Strategi terakhir bersifat

praktikal dimana langsung fokus pada potensi yang selama ini telah ada, namun tidak dikembangkan dengan baik.

### 3.3 STRATEGI SMART ECONOMY

Smart economy Kabupaten Luwu berfokus pada peningkatan kualitas dan kuantitas industri di bidang agribisnis guna memberikan dampak pada sektor lainnya, seperti penyediaan lapangan kerja dan menurunkan kemiskinan. Berikut adalah strategi yang disusun untuk mencapai smart economy Kabupate Luwu

**Tabel 10 Strategi Pembangunan Smart Economy Kabupaten Luwu**

SUBDIMENSI	SASARAN	STRATEGI
Ec.1 Industri yang Berdaya Saing	Ec.1.1 Meningkatnya kuantitas dan kualitas sektor pengolahan	Ec.1.1.1 Mendorong pengembangan potensi koperasi dan UMKM, serta meningkatkan peran kelembagaan dan pengawasan
		Ec.1.2.1 Melaksanakan dan mengakselerasikan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dengan berfokus pada pada pengoptimalan sumber ekonomi unggulan daerah dan sektor baru yang berkesesuaian dengan potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam daerah
Ec.2 Kesejahteraan Rakyat	Ec.2.1 Meningkatnya kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah	Ec.2.1.1 Meningkatkan jumlah dan kualitas sarana dan prasana pertanian
		Ec.2.1.2 Melakukan diversifikasi produk tanaman pangan

SUBDIMENSI	SASARAN	STRATEGI
	Ec.2.2 Meningkatnya pendapatan masyarakat	Ec.2.2.1 Mendorong penerapan kebijakan pengendalian dan distribusi perekonomian
Ec. 3 Ekosistem Transaksi Keuangan	Ec.3.1 Terwujudnya kemudahan akses perbankan guna meningkatkan kuantitas dan kualitas industri	Ec.3.1.1 Mempercepat pelaksanaan elektronifikasi transaksi di lingkungan pelayanan publik pemerintah daerah

Sumber: Analisis Tim, 2023

Koperasi dan UMKM masih menjadi tumpuan pada peningkatan perekonomian daerah Kabupaten Luwu, terutama di bidang pertanian. Sektor ini merupakan penyumbang perekonomian terbesar di Kabupaten Luwu. Maka dari itu, strategi yang disusun untuk dimensi ini banyak berfokus pada pengembangan kapasitas koperasi dan UMKM, termasuk dengan meningkatkan inovasi pada produk turunan untuk menciptakan nilai tambah produk-produk yang dihasilkan di Kabupaten Luwu.

### 3.4 STRATEGI SMART LIVING

Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan merupakan salah satu fokus Pemerintah Kabupaten Luwu untuk mewujudkan smart living Kabupaten Luwu. Sektor kesehatan merupakan salah satu sektor yang memiliki daya saing cukup tinggi dibandingkan dengan kabupaten/kota sekitarnya. Sarana kesehatan yang tersedia sering menjadi rujukan dari rumah sakit lain di sekitar Kabupaten Luwu.

**Tabel 11 Strategi Pembangunan Smart Living Kabupaten Luwu**

SUBDIMENSI	SASARAN	STRATEGI
Lv.1 Harmonisasi Tata Ruang	Lv.1.1 Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman	LV.1.1.1 Optimalisasi pengelolaan data dan informasi
Lv.2 Prasarana Kesehatan	Lv.2.1 Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Lv.2.1.1 Meningkatkan aksesibilitas pelayanan kesehatan yang mudah, cepat dan terjangkau serta terintegrasi

SUBDIMENSI	SASARAN	STRATEGI
		Lv.2.1.2 Meningkatkan akses pelayanan rekomendasi perizinan di Kantor Dinkes Kab. Luwu
		Lv.2.1.3 Menciptakan lingkungan perawatan rumah sakit yang bersih dan aman
Lv. 3 Sarana Transportasi	Lv.3.1 Meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas wilayah	Lv.3.1.1 Mengembangkan angkutan umum

Sumber: Analisis Tim, 2023

Pelayanan rumah sakit di Kabupaten Luwu juga memiliki keunikan tersendiri dimana adanya fasilitas yang disediakan oleh pengelola bagi keluarga pasien yang berasal dari luar daerah. Fasilitas yang dimaksud disebut "rumah kurcaci" karena bentuknya yang unik. Selama ini fasilitas yang disediakan di sini menjadi salah satu fasilitas yang diapresiasi oleh pengguna fasilitas rumah sakit. Untuk itu, strategi untuk meningkatkan aksesibilitas pelayanan kesehatan dan konektivitas wilayah menjadi penting untuk mendukung pelayanan rumah sakit.

### 3.5 STRATEGI SMART SOCIETY

Interaksi komunitas dan keamanan masyarakat menjadi fokus pada pencapaian smart society Kabupaten Luwu. Namun bukan berarti pendidikan mendapatkan perhatian yang kurang. Subdimensi pendidikan saat ini difokuskan pada peningkatan drajat pendidikan masyarakat dimana salah satunya adalah dengan mengoptimalkan pelatihan berbasis kebutuhan pasar, disamping strategi untuk tetap memastikan pendidikan dasar tetap terpenuhi.

**Tabel 12 Strategi Pembangunan Smart Society Kabupaten Luwu**

SUBDIMENSI	SASARAN	STRATEGI
S.1 Interaksi Komunitas	S.1.1 Terwujudnya kesadaran masyarakat dalam mengenal dan mencintai budaya lokal	S.1.1.1 Meningkatkan kapasitas kelembagaan adat desa RT/RW, Karang Taruna, LPM dan Posyandu

SUBDIMENSI	SASARAN	STRATEGI
S.2 Ekosistem Belajar	S.2.1 Terwujudnya peningkatan derajat pendidikan masyarakat	S.2.1.1 Optimalisasi pelatihan berbasis kebutuhan pasar kerja
S.3 Sistem Keamanan Masyarakat	S.3.1 Terwujudnya kehidupan sosial yang berkualitas	S.3.1.1 Meningkatkan kinerja kader dalam pendampingan Ibu Hamil dan Pasangan Usia Subur
		S.3.1.2 Meningkatkan layanan bantuan untuk pemenuhan kebutuhan dasar bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Sumber: Analisis Tim, 2023

Untuk mewujudkan interaksi masyarakat yang diinginkan, strategi mulai dari meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat, peningkatan kapasitas SDM pelayanan sosial, hingga peningkatan pelayanan untuk Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) menjadi strategi-strategi yang dipilih guna memastikan kesadaran masyarakat akan budaya sekaligus meningkatkan kualitas kehidupan sosial.

Sedangkan untuk keamanan masyarakat, selain meningkatkan penegakan hukum dan ketertiban umum, strategi-strategi yang berkaitan dengan ketangguhan daerah untuk menghadapi bencana juga menjadi perhatian, salah satunya melalui implementasi kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta manajemen penanggulangan bencana.

### 3.6 STRATEGI SMART ENVIRONMENT

Peningkatan kesadaran akan pentingnya perlindungan terhadap lingkungan yang berkelanjutan merupakan garis besar yang ingin dicapai dalam penyusunan smart environment Kabupaten Luwu. Berikut adalah strategi-strategi yang dirumuskan untuk mencapai tujuan tersebut.

**Tabel 13 Strategi Pembangunan Smart Environment Kabupaten Luwu**

<b>SUBDIMENSI</b>	<b>SASARAN</b>	<b>STRATEGI</b>
En.1 Proteksi Lingkungan	En.1.1 Meningkatnya kualitas lingkungan yang berkelanjutan	En.1.1.1 Mengoptimalkan implementasi kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta manajemen penanggulangan bencana
En.2 Pengelolaan Limbah dan Sampah	En.2.1 Tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan limbah terpadu	En.2.1.1 Mengupayakan pemenuhan infrastruktur dalam rangka penyehatan lingkungan yang berkualitas
		En.2.1.2 Mendorong keterlibatan masyarakat dalam rangka mengefektifkan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun dan timbulan
En.3 Tata Kelola Energi	En.3.1 Tersedianya kebijakan pengelolaan energi alternatif terbarukan dan berkelanjutan	En.3.1.1 Mendorong Pengelolaan Sampah Untuk Menjadi Sumber Energi Alternatif

*Sumber: Analisis Tim, 2023*

Dalam Upaya meningkatkan kualitas lingkungan yang berkelanjutan, ditetapkan keterlibatan masyarakat dalam mengefektifkan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun dan timbulan sebagai strategi yang dipilih. Selanjutnya pada subdimensi pengelolaan limbah dan sampah, pemenuhan infrastruktur menjadi strategi yang dipilih sehingga masyarakat bisa memanfaatkan sarana dan prasarana yang tersedia untuk pengelolaan sampah. Sedangkan untuk tata kelola energi, strategi yang dipilih adalah menyusun regulasi dan cara penilaian/evaluasi dokumen untuk memudahkan kontrol terhadap usaha pertambangan yang lebih terbuka.



# 4

---

# RENCANA AKSI SMART CITY

KABUPATEN LUWU

Rencana aksi merupakan tahapan-tahapan yang dilakukan dalam mewujudkan suatu program dan kegiatan yang telah disusun. Rencana aksi terdiri dari langkah atau tindakan yang diambil dan waktu pelaksanaannya. Dalam Penyusunan Master Plan Smart City Kabupaten Luwu, terdapat 4 (empat) tahapan penting yang harus direncanakan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan dalam setiap dimensi. Adapun tahapan yang harus direncanakan dalam penerapan program adalah sebagai berikut:

**A. RENCANA AKSI PENGEMBANGAN KEBIJAKAN DAN KELEMBAGAAN**

Rencana aksi ini berkaitan dengan ketersediaan dasar hukum dalam menjalankan program yang telah direncanakan. Hal ini penting sebagai landasan hukum pelaksanaan program. Selain itu, yang tidak kalah penting adalah mengenai kelembagaan. Kelembagaan di sini berkaitan dengan pembentukan tim yang berperan dalam penyusunan maupun pelaksanaan program nantinya sehingga jelas dalam pembagian tugas dan kewajiban dari masing-masing pihak yang terlibat

**B. RENCANA AKSI PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR PENDUKUNG**

Infrastruktur yang dimaksud adalah infrastruktur fisik yang harus tersedia untuk berjalannya program. Hal ini penting sebagai dukungan dalam mencapai tujuan dan sasaran program

**C. RENCANA AKSI PENYEDIAAN PERANGKAT LUNAK PENDUKUNG**

Penyediaan perangkat lunak pendukung erat kaitannya dengan teknologi, seperti software, aplikasi, ataupun berupa platform komunikasi dan koordinasi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Tahapan ini penting karena dalam pelaksanaan smart city, peran teknologi menjadi sangat penting sebagai enabler dalam penerapan program-program yang telah disusun

**D. RENCANA AKSI PENGUATAN LITERASI**

Salah satu aspek yang juga penting adalah bagaimana program dan kegiatan yang direncanakan dalam menjangkau dan digunakan oleh pihak penyedia maupun penerima manfaat, sehingga program dan kegiatan yang direncanakan dapat bermanfaat dan berfungsi sesuai dengan yang diharapkan.

#### 4.1 RENCANA AKSI SMART GOVERNANCE

Rencana aksi dalam dimensi smart governance sudah dimulai pada beberapa tahun sebelumnya, terutama yang berkaitan dengan tahapan pengembangan kebijakan dan kelembagaan. Inovasi Bahasa Cinta telah memulai proses di tahun 2022 dengan ditetapkannya kebijakan nasional terkait dengan pencatatan kependudukan. Untuk di Kabupaten Luwu sendiri, peraturan nasional tersebut baru dilaksanakan di tahun 2023 dalam Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Nomor 470/185/DKC/VI/2023 tentang pembentuka tim dan pelaksanaan Kerjasama antarinstansi yang terlibat. Sedangkan untuk inovasi SINDIKAT (Sistem Informasi Pendidikan dan Pelatihan sudah ditetapkan dalam peraturan bupati tahun 2019. Untuk subdimensi keterbukaan kebijakan publik baru mulai dilaksanakan di tahun 2021 dengan diterbitkannya peraturan bupati tentang pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi.

**Tabel 14 Rencana Aksi Smart Governance**

Strategi	Nama Inovasi	Rencana Aksi/Tahun							
		Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun
<b>G.1 PELAYANAN PUBLIK</b>									
G.1.1.1 Meningkatkan persentase data pemenuhan data dokumen kependudukan	Bahasa Cinta (Bayi Harus Aktif dan Pencatatan, identitas dan Jaminan Kesehatannya)	G.1.1.1.A1 Melaksanakan Permendagri No. 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden RI No.96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.	2022	G.1.1.1.B1 Melakukan pengdaan ruang koordinasi inovasi Bahasa Cinta " Bayi Baru Lahir harus aktif pencatatan identitas dan data jaminan kesehatannya" antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu dengan BPJS Kantor Cabang Palopo, Dinas Kesehatan, Puskesmas, Pustu, dan Rumah Sakit.	2023	G.1.1.1.C1 Menambahkan Link Informasi Program Pelayanan Administrasi Kependudukan dengan Unit Mobile pada Website Pemda	2024	G.1.1.1.D1 Melakukan sosialisasi ke masyarakat melalui banner yang berbagai pusat layanan seperti kantor lurah dan puskesmas	2023
		G.1.1.1.A2 Melaksanakan amanat UU nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas UU nomor 23 tahun 2006 administrasi kependudukan	2023	G.1.1.1.B2 Melakukan pengadaan ATK untuk mendukung operasional kegiatan	2023	G.1.1.1.C2 Membentuk grup Whatsapp untuk koordinasi dengan semua yang terlibat dalam program	2024	G.1.1.1.D2 Melakukan sosialisasi melalui media sosial	2023

Strategi	Nama Inovasi	Rencana Aksi/Tahun							
		Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun
		<b>G.1.1.1.A3</b> Melaksanakan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Luwu nomor : 470/185/DKC/VI/2023 tentang pembentukan tim pelaksana perjanjian kerjasama Bahasa Cinta " Bayi Baru lahir harus aktif pencatatan identitas dan data jaminan kesehatannya" antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu dengan BPJS Kantor Cabang Palopo, Dinas Kesehatan, Puskesmas, Pustu, dan Rumah Sakit.	2023	<b>G.1.1.1.B3</b> Melakukan pengadaan alat pencatatan kependudukan	2023				
<b>G.2 BIROKRASI YANG EFISIEN</b>									
<b>G.2.1.1</b> Meningkatkan inovasi pelayanan publik melalui pengembangan sumber daya manusia yang kompeten	<b>SINDIKAT</b> (Sistem informasi pendidikan dan Pelatihan)	<b>G.2.1.1.A1</b> Melaksanakan Peraturan Bupati Luwu No 69 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen kepegawaian Lingkup Pemerintah Kab. Luwu	2019	<b>G.2.1.1.B1</b> Melakukan kerjasama antar OPD terkait Kebutuhan Kompetensi ASN dan persiapan anggaran pelatihnann untuk ASN dilingkup OPD masing-masing, kerjasama dengan lembaga pendikan dan pelatihan (LAN, BPSDM Prov SULSEL, dll)	2023	<b>G.2.1.1.C1</b> Mengembangkan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian dengan menambahkan Menu baru "sindikat" pada Dashboard	2024	<b>G.2.1.1.D1</b> Melakukan sosialisasi ke OPD	2024

Strategi	Nama Inovasi	Rencana Aksi/Tahun							
		Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun
<b>G.3 KEBIJAKAN PUBLIK YANG EFISIEN</b>									
G.3.1.1 Meningkatkan pemahaman terhadap produk hukum daerah	<b>JDIH</b> (Sistem Informasi Produk Hukum Daerah)	<b>G.3.1.1.A1</b> Pelaksanaan Perbub No 12 tahun 2021 tentang pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi	2021	<b>G.3.1.1.B1</b> Memastikan komputer, jaringan wifi, scanner, operator bekerja dengan baik dan melakukan kerjasama dengan Kominfo (TIM IT)	2023	<b>G.3.1.1.C1</b> Mengembangkan website jdih', pengembangan aplikasi jdih yang bisa di akses melalui smartphone	2023	<b>G.3.1.1.D1</b> Melakukan sosialisasi melalui media digital	2023

Sumber: Analisis Tim, 2023

Beberapa tahapan atau proses penerapan inovasi dari smart governance juga sudah banyak yang mulai dilakukan di tahun 2023. Namun, penerapan tersebut masih belum optimal karena belum terintegrasinya berbagai komponen dan kesulitan dalam penyebarluasan informasi. Oleh karena itu, untuk inovasi Bahasa Cinta dan SINDIKAT mulai tahun 2024 akan mulai memanfaatkan teknologi seperti website dan pengintegrasian dengan website yang sudah ada guna memastikan kemudahan penggunaan dan pencapaian tujuan dan sasaran program.

#### 4.2 RENCANA AKSI SMART BRANDING

Subdimensi smart branding pada rencana pembangunan Kabupaten Luwu masih belum mendapatkan perhatian yang optimal. Oleh karena itu, ada beberapa inovasi yang digagas untuk memastikan branding dari Kabupaten Luwu dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Beberapa dari tahapan inovasi sudah dilakukan beberapa tahun ke belakang, seperti pengesahan kebijakan dan pembentukan kelembagaan. Namun untuk penyediaan infrastruktur dan penguatan literasi masih harus direncanakan lebih lanjut. Berikut adalah rencana aksi yang termasuk dalam dimensi smart branding:

**Tabel 15 Rencana Aksi Smart Branding**

Strategi	Nama Inovasi	Rencana Aksi/Tahun							
		Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun
<b>B.1 PARIWISATA</b>									
B.1.1.1 Membangun dan mengembangkan destinasi wisata yang inklusif dan berkelanjutan	Promosi wisata digital dan rebranding destinasi wisata	<b>B.1.1.1.A1</b> Melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Induk Pengembangan Kepariwisata Kabupaten Luwu Tahun 2021-2036	2021	<b>B.1.1.1.B1</b> Melakukan pengadaan komputer, printer, dan telepon pintar sebagai sarana pelaporan dan input data,	2024	<b>B.1.1.1.C1</b> Mengembangkan media digital: Instagram dan Facebook	2025	<b>B.1.1.1.D1</b> Promosi Wisata Melalui Media Digital Melalui Instagram dan Facebook	2026
				<b>B.1.1.1.B2</b> Membangun Home stay di bukit sinaji Kec. Basse Sangtempe, Pengaspalan Jalan	2024	<b>B.1.1.1.C2</b> Memastikan ketersediaan jaringan (Akses Internet), Software (Design Homestay) dan Titik Koordinat Maps	2025	<b>B.1.1.1.D2</b> Melaksanakan bimtek dan Sertifikasi Pemandu Wisata Gunung	2026
	Pengembangan Objek Wisata Bonglo (Explore Bonglo)	<b>B.1.1.1.A2</b> Melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Induk Pengembangan Kepariwisata Kabupaten Luwu Tahun 2021-2036	2021	<b>B.1.1.1.B3</b> Pengadaan komputer, printer, dan telepon pintar sebagai sarana pelaporan dan input data, serta pengadaan Instalasi sumber air bersih	2024	<b>B.1.1.1.C3</b> Memastikan ketersediaan jaringan (Akses Internet), Software (Design Homestay), Perangkat Lunak Geografis Pariwisata Bonglo, dan Video Profil Wisata Bonglo	2025	<b>B.1.1.1.D3</b> Melakukan promosi Wisata Melalui Media Digital Melalui Instagram dan Facebook dan Bimtek/Sertifikasi Pemandu Wisata	2026

Strategi	Nama Inovasi	Rencana Aksi/Tahun							
		Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun
<b>B.2 EKOSISTEM BISNIS</b>									
B.2.1.1 Menghadirkan platform dashboard dan portal Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang informatif dan interaktif	<b>Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko ( OSS )</b>	<b>B2.1.1.A1</b> Melaksanakan PERATURAN BUPATI KABUPATEN LUWU NOMOR 11 TAHUN 2022 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO	2022	<b>B2.1.1.B1</b> Melakukan pengadaan komputer, printer, dan telepon pintar sebagai sarana pelaporan dan input data <b>B2.1.1.B2</b> Melakukan pemasangan Jaringan Internet <b>B2.1.1.B3</b> Membangun Gerai Perizinan	2024	<b>B2.1.1.C1</b> Memastikan dapat diaksesnya <a href="https://oss.co.id">OSS.co.id</a> dan <a href="https://sites.google.com/view/sipemandu-luwukab/aplikasi">https://sites.google.com/view/sipemandu-luwukab/aplikasi</a>	2024	<b>B2.1.1.D1</b> Melakukan sosialisasi Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik (OSS)	2024
<b>B.3 WAJAH KOTA</b>									
B.3.1.1 Menjadikan tampilan Kabupaten Luwu yang menarik dan berkarakter	<b>Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik</b>	<b>B.3.1.1.A1</b> Melaksanakan Peraturan Bupati Luwu Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik	2023	<b>B.3.1.1.B1</b> Memastikan tersedianya bangunan dan gerai <b>B.3.1.1.B2</b> Memastikan ketersediaan jaringan listrik	2023	<b>B.3.1.1.C1</b> Memastikan ketersediaan jaringan internet	2023	<b>B.3.1.1.D1</b> Melakukan sosialisasi Penyelenggaraan MAL Pelayanan Publik	2024
B.3.1.2 Mengembangkan IKM Barambing	<b>IKM Barambing sebagai rest area sebagai fasilitas pengguna jalan yang melintasi Kab. Luwu</b>	<b>B.3.1.2.A1</b> Melaksanakan Peraturan Bupati Luwu tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi dan Sewa Gedung di Sentra IKM Barambing	2023	<b>B.3.1.2.B1</b> Membangun Gerai, Musholla, Toilet, Lahan Parkir <b>B.3.1.2.B2</b> Memastikan ketersediaan jaringan listrik	2024	<b>B.3.1.2.C1</b> Memastikan ketersediaan jaringan Internet	2023	<b>B.3.1.2.D1</b> PMenyelenggarakan Pasar Murah <b>B.3.1.2.D2</b> Melakukan pengenalan inovasi kepada Agen Travel, Pangkalan Bus, Pemilik Kendaraan Sewa	2024

Sumber: Analisis Tim, 2023

Terdapat 4 (empat) inovasi yang digagas dalam dimensi smart branding smart city Kabupaten Luwu. Rencana Induk Pariwisata Kabupaten Luwu sebenarnya telah disusun di tahun 2021. Namun belum diimplementasikan dengan baik, sehingga kondisi pariwisata Luwu terkesan belum berkembang. Oleh karena itu, pada subdimensi pariwisata, terdapat inovasi Promosi Wisata dan Rebranding Wisata. Hal ini berguna untuk membangkitkan kondisi kepariwisataan Kabupaten Luwu. Untuk itu diperlukan penyediaan infrastruktur fisik maupun perangkat lunak pendukung untuk memastikan keberlangsungan penerapan program. Semua tahapan tersebut dilakukan di tahun 2024, termasuk sosialisasi dan bimbingan teknis pengembangan pariwisata.

Sedangkan untuk subdimensi ekosistem bisnis, website mengenai pendaftaran usaha sudah dimiliki sejak tahun 2021 untuk memudahkan dilakukannya pendaftaran usaha oleh pemilik usaha. Inovasi yang dilakukan bernama SIPEMANDU yang nantinya memadukan investasi ini dengan pengawasan gedung, sehingga rencana pembangunan dan rencana investasi bisa berjalan secara sinergis. Selain itu, ada juga Penyelenggaraan Mall Pelayanan Publik yang memudahkan pemilik usaha atau bisnis untuk mengurus semua keperluan administrasinya dalam satu pintu. Semuanya mulai akan dikembangkan di tahun 2024.

Untuk wajah kota, Kabupaten Luwu ingin mengangkan kembali IKM Barimbing yang lama terbengkalai, padahal galeri ini ada di pinggir jalan Trans Sulawesi yang banyak dilalui oleh kendaraan dan memiliki tampilan yang mencolok. Diharapkan pengembangan kembali IKM ini dapat menjadi salah satu alternatif singgah bagi wisatawan ataupun pengguna jalan Trans Sulawesi sekaligus memperkenalkan produk-produk asli Kabupaten Luwu kepada masyarakat luas. Peningkatan infrastruktur direncanakan di tahun 2024, termasuk untuk pomosinya.

### 4.3 RENCANA AKSI SMART ECONOMY

Subdimensi smart economy yaitu industri yang berdaya saing dan kesejahteraan rakyat banyak berfokus pada pengelolaan produk pertanian sebagai salah satu produk unggulan di Kabupaten Luwu. Dengan digagasnya inovasi mengenai berbagai bidang pertanian ini, diharapkan dapat meningkatkan produk hasil olahan pertanian yang nantinya berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Luwu. Inovasi yang dilakukan masih banyak yang baru direncanakan sebagai bentuk tanggapan terhadap isu strategis di Kabupaten Luwu.

**Tabel 16 Rencana Aksi Smart Economy**

Strategi	Nama Inovasi	Rencana Aksi/Tahun							
		Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun
<b>Ec.1 INDUSTRI YANG BERDAYA SAING</b>									
Ec.1.1.1 Mendorong pengembangan potensi koperasi dan UMKM, serta meningkatkan peran kelembagaan dan pengawasan	<b>SiAP UMKM</b>	<b>Ec.1.1.1.A1</b> Melaksanakan SK Tim tentang Penanggung Jawab Kegiatan	2024	<b>Ec.1.1.1.B1</b> Melakukan survey berbasis spasial Pengelola UMKM by name by adrees	2025	<b>Ec.1.1.1.C1</b> Mengembangkan Sistem Aplikasi untuk Android dan Desktop	2025	<b>Ec.1.1.1.D1</b> Melakukan sosialisasi antar OPD, Pelaku UMKM	2026
Ec.1.2.1 Melaksanakan dan mengakselerasikan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dengan berfokus pada pada pengoptimalan sumber ekonomi unggulan daerah dan sector baru yang berkesesuaian dengan potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam daerah	<b>UGI</b> (UMKM Go INternasional)	<b>Ec.1.2.1.A1</b> Melaksanakan SK Tim tentang Penanggung Jawab Kegiatan	2023	<b>Ec.1.2.1.B1</b> Menjalin kerjasama antarinstansi dengan pengadaan server di Kominfo	2024	<b>Ec.1.2.1.C1</b> Membangun kerjasama dengan market place	2025	<b>Ec.1.2.1.D1</b> Melakukan sosialisasi dan pelaku UMKM	2026
<b>Ec.2 KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>									
Ec.2.1.1 Meningkatkan jumlah dan kualitas sarana dan prasana pertanian	<b>Smart Farming</b>	<b>Ec.2.1.1.A1</b> Melaksanakan SK Tim tentang Penanggung Jawab Kegiatan	2024	<b>Ec.2.1.1.B1</b> Menjalin kerjasama antar instansi dengan pengadaan server di Kominfo	2025	<b>Ec.2.1.1.C1</b> Pengembangan Sistem Aplikasi untuk Android dan Desktop	2026	<b>Ec.2.1.1.D1</b> Sosialisasi antar OPD, penyuluh dan petani	2027
				<b>Ec.2.1.1.B2</b> Melakukan pengadaan sarpras pendukung	2025			<b>Ec.2.1.1.D2</b> Pelatihan aplikasi Smart farming	2027
				<b>Ec.2.1.1.B3</b> Melakukan kerjasama dengan penyedia jaringan TIK	2025				

Strategi	Nama Inovasi	Rencana Aksi/Tahun							
		Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun
Ec.2.1.2 Melakukan diversifikasi produk tanaman pangan	<b>Dapur B2SA</b> (Beragam Bergisi, Seimbang dan Aman)	<b>Ec.2.1.2.A1</b> Melaksanakan SK Tim tentang Penanggung Jawab Kegiatan	2024	<b>Ec.2.1.2.B1</b> Menentukan penerima manfaat, Pengadaan sarpras pendukung	2025	<b>Ec.2.1.2.C1</b> Mengembangkan Sistem Aplikasi untuk Android dan Desktop (Aplikasi e-magazine resep)	2026	<b>Ec.2.1.2.D1</b> Melakukan sosialisasi kepada penerima manfaat	2027
Ec.2.1.3 Mendorong penerapan kebijakan pengendalian dan distribusi perekonomian	<b>SiBapok</b> (Sistem Informasi Bahan Pokok)	<b>Ec.2.1.3.B1</b> Melaksanakan SK Tim tentang Penanggung Jawab Kegiatan	2023	<b>Ec.2.1.3.B1</b> Melakukan kerjasama antar instansi dengan pengadaan server di Kominfo	2024	<b>Ec.2.1.3.C1</b> Mengembangkan Sistem Aplikasi untuk Android dan Desktop	2025	<b>Ec.2.1.3.D1</b> Melakukan sosialisasi kepada daerah penghasil untuk menjaga stabilitas harga	2026
				<b>Ec.2.1.3.B2</b> Melakukan pengadaan sarpras pendukung					
<b>Ec.3 EKOSISTEM TRANSAKSI KEUANGAN</b>									
Ec.3.1.1 Mempercepat pelaksanaan elektronifikasi transaksi di lingkungan pelayanan publik pemerintah daerah	<b>OTO QRIS</b>	<b>Ec.3.1.1.A1</b> Melaksanakan amanat SK No 163/III/2022 tentang Peta Jalan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	2024	<b>Ec.3.1.1.B1</b> Melakukan kerja sama dengan OPD terkait, Pengelola Pajak dan Retribusi dan LJK (Lembaga Jasa Keuangan)	2025	<b>Ec.3.1.1.C1</b> Melakukan pengembangan Sistem Aplikasi untuk Android dan Desktop	2025	<b>Ec.3.1.1.D1</b> Melaksanakan bimtek & Sosialisasi Kepada Objek Pajak dan Retribusi	2026
		<b>Ec.3.1.1.A2</b> Melaksanakan amanat SK No 191/III/2021 Tentang Pembentukan TP2DD Kab Luwu							
	<b>SIPAREDA</b> (Sistem Informasi Pajak dan Retribusi Daerah)	<b>Ec.3.1.1.A3</b> Melaksanakan amanat SK No 656/XI/2021 tentang Pembentukan Tim Pengelola Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pajak dan Retribusi Daerah	2024	<b>Ec.3.1.1.B2</b> Melakukan kerja sama dengan OPD terkait, Pengelola Pajak dan Retribusi dan LJK (Lembaga Jasa Keuangan)	2025	<b>Ec.3.1.1.C2</b> Melakukan pengembangan Sistem Aplikasi untuk Android dan Desktop	2025	<b>Ec.3.1.1.D2</b> Melaksanakan bimtek & Sosialisasi Kepada Objek Pajak dan Retribusi	2026

Sumber: Analisis Tim, 2023

Beberapa kegiatan masih baru akan dilakukan di tahun 2023 terutama pada pengembangan kebijakan dan kelembagaan, sedangkan tahapan lainnya lebih banyak dilakukan di tahun 2024 dan 2025, bahkan untuk beberapa inovasi seperti OTO QRIS dan SIPAREDA baru akan disosialisasikan kepada pihak terkait dan penerima manfaat pada tahun 2026. Bahkan untuk beberapa inovasi, seperti SIBAPOK dan smart farming baru akan disosialisasikan di tahun 2027.

#### 4.4 RENCANA AKSI SMART LIVING

Dimensi smart living memiliki beberapa inovasi yang cukup strategis untuk menjadikan Kabupaten Luwu sebagai pusat kegiatan dan memiliki daya saing lebih dibandingkan dengan kabupaten dan kota sekitarnya, terutama di bidang kesehatan. Beberapa inovasi seperti SI-PETARUNG sudah memiliki landasan hukum daerah yang kuat dengan ditetapkannya peraturan bupati pada tahun 2022. Namun pembentukan tim lebih lanjut masih harus dilakukan di tahun 2024 untuk memastikan pembagian tugas dan fungsi masing-masing pihak yang terlibat. Inovasi ini direncanakan dengan cukup komprehensif dari penyusunan tim hingga monitoring dan evaluasi. Semua tahapan dimulai di tahun 2024 dan diharapkan sudah dapat disosialisasikan di tahun 2025.

Sama halnya dengan SI-PETARUNG, SI-PELARI yang merupakan inovasi yang mengintegrasikan transportasi di Kabupaten Luwu juga direncanakan untuk dapat dimulai di tahun 2024. Dimulai dari pembentukan tim, penyediaan aplikasi, hingga disosialisasikan di tahun 2025. Diharapkan di tahun 2025 sudah terbentuk tim yang berasal dari lintas disiplin dan lintas instansi untuk memaksimalkan pelaksanaan inovasi ini.

**Tabel 17 Rencana Aksi Smart Living**

Strategi	Nama Inovasi	Rencana Aksi/Tahun							
		Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun
<b>Lv.1 TATA RUANG YANG HARMONIS</b>									
Lv.1.1.1 Optimalisasi Pengelolaan Data dan Informasi	SI-PETARUNG (Sistem Penataan Ruang)	Lv.1.1.1.A1 Melaksanakan Perbup Luwu Nomor 114 Tahun 2022 tentang pelaksanaan perda nomor 5 tahun 2022 tentang partisipasi dan transparansi dan informasi publik	2023	Lv.1.1.1.B1 Melakukan pengadaan komputer PC / Laptop, Proyektor, TV, Perangkat lunak pengarsipan, retensi data	2024	Lv.1.1.1.C1 Membangun sistem pelaporan dan pengawasan, pengawasan dan penegakan, basis data dan informasi	2025	Lv.1.1.1.D1 Sosialisasi dan Bimtek Teknis	2025
		Lv.1.1.1.A2 Membentuk Tim Percepatan realisasi SI-PETARUNG	2024	Lv.1.1.1.B2 Melibatkan instansi terkait	2025	Lv.1.1.1.C2 Melakukan pengadaan komputer PC / Laptop, Proyektor, TV, Software pengelolaan data Tim, Perangkat lunak keamanan seperti (firewall, antivirus, pendeteksi ancaman sistem)	2025	Lv.1.1.1.D2 Tim multidisipliner, penetapan tujuan yang jelas, evaluasi kinerja	2025

Strategi	Nama Inovasi	Rencana Aksi/Tahun							
		Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun
		<b>Lv.1.1.1.A3</b> Pembentukan tim pelaksanaan sosialisasi dan edukasi penerapan SI-PETARUNG	2024	<b>Lv.1.1.1.B3</b> Media sosial dan platform online, layanan hotline dan dukungan, jaringan komunikasi dan kolaborasi	2024	<b>Lv.1.1.1.C3</b> Sistem manaajemen pembelajaran, webinar dan video conference, aplikasi mobile edukasi, perangkat lunak simulasi, pustaka digital	2024	<b>Lv.1.1.1.D3</b> Melakukan pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan loka karya, pameran dan demonstrasi	2024
		<b>Lv.1.1.1.A4</b> Membentuk tim Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan SI-PETARUNG	2025	<b>Lv.1.1.1.B4</b> Melaksanakan Monitoring dan EValuasi	2025	<b>Lv.1.1.1.B4</b> Software manajemen kinerja organisasi, manajemen SDM, perangkat lunak survei, manajemen kualitas	2025	<b>Lv.1.1.1.D4</b> Pengumpulan data yang tepat, pendidikan dan pelatihan, Pelaporan dan komunikasi, keterlibatan ahli eksternal	2025
<b>Lv.2 PRASARANA KESEHATAN</b>									
Lv.2.1.1 Meningkatkan aksesibilitas pelayanan kesehatan yang muda, cepat dan terjangkau serta terintegrasi	<b>SIPAKATAU-KI</b> (Sistem Informasi Pelayanan Kesehatan yang cepat dan terjangkau, kolektif dan terintegrasi)	<b>Lv.2.1.1.A1</b> Melakukan amanat Perbup Luwu Nomor 114 tentang Pelaksanaan Perda Kab.Luwu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Partisipasi Publik dan Transparansi Layanan Publik	2024	<b>Lv.2.1.1.B1</b> Komputer/laptop dan HP	2025	<b>Lv.2.1.1.C1</b> Perangkat lunak pengarsipan, retensi data	2025	<b>Lv.2.1.1.D1</b> Pelatihan, Bimtek, sosialisasi,promosi ke media	2025
Lv.2.1.2 Meningkatkan akses pelayanan rekomendasi perizinan di Kantor Dinkes Kab. Luwu	<b>Pelayanan Rekomendasi Perizinan SI-CETAR</b> (Sistem yang cepat, tanggap dan Ramah)	<b>Lv.2.1.2.A1</b> Menyusun SK Bupati tentang pembentukan SI-CETAR	2024	<b>Lv.2.1.2.B1</b> Melakukan pengadaan komputer/laptop dan HP	2025	<b>Lv.2.1.2.C1</b> Mengembangkan perangkat lunak pengarsipan, retensi data	2025	<b>Lv.2.1.2.D1</b> Melakukan pelatihan, Bimtek, sosialisasi,promosi ke media	2025

Strategi	Nama Inovasi	Rencana Aksi/Tahun							
		Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun
Lv.2.1.3 Menciptakan lingkungan perawatan rumah sakit yang bersih dan aman	<b>Rumah KURCACI RSUD</b> (rumah tunggu untuk keluarga pasien yang sementara di rawat di Rumah sakit Batara Guru)	<b>Lv.2.1.3.A1</b> Menyusun SK Bupati tentang Pengelolaan Rumah Kurcaci	2021	<b>Lv.2.1.3.B1</b> Memastikan tersedianya lahan dan anggaran	2024	<b>Lv.2.1.3.C1</b> Pengembangkan sistem pengelolaan yang lebih profesional	2025	<b>Lv.2.1.3.D1</b> Mengembangkan SDM dan sarana penunjang	2022
<b>Lv.3 SARANA TRANSPORTASI</b>									
Lv.3.1.1 Peningkatan konektivitas layanan transportasi	<b>SI-PELARI</b> (Sistem Layanan Transportasi Terintegrasi)	<b>Lv.3.1.1.A1</b> Melaksanakan Perbup Luwu Nomor 114 Tahun 2022 tentang pelaksanaan perda nomor 5 tahun 2022 tentang partisipasi dan transparansi dan informasi publik	2024	<b>Lv.3.1.1.B1</b> Melakukan kerja sama antar OPD Terkait	2025	<b>Lv.3.1.1.C1</b> Melakukan pengadaan komputer PC / Laptop, Proyektor, TV, Perangkat lunak pengarsipan, retensi data	2025	<b>Lv.3.1.1.D1</b> Melakukan sosialisasi dan Bimtek Teknis	2025
		<b>Lv.3.1.1.A2</b> Pembentukan Tim Percepatan realisasi SI-PELARI	2025	<b>Lv.3.1.1.B2</b> Melakukan pengadaan komputer PC / Laptop, Proyektor, TV, Software pengelolaan data Tim, Perangkat lunak keamanan seperti (firewall, antivirus, pendeteksi ancaman sistem)	2025	<b>Lv.3.1.1.C2</b> Membangun sistem pelaporan dan pengawasan, pengawasan dan penegakan, basis data dan informasi	2025	<b>Lv.3.1.1.D2</b> Membentuk tim multidisipliner, penetapan tujuan yang jelas, evaluasi kinerja	2025

Strategi	Nama Inovasi	Rencana Aksi/Tahun							
		Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun
		<b>Lv.3.1.1.A3</b> Membentuk tim pelaksanaan sosialisasi dan edukasi penerapan SI-PELARI	2025	<b>Lv.3.1.1.B3</b> Membentuk forum diskusi dan konsultasu publik; Layanan hotline dan dukungan; pameran dan demonstrasi	2025	<b>Lv.3.1.1.C3</b> Melakukan pengadaan komputer PC / Laptop, Proyektor, TV, Sistem manajemen pembelajaran, webinar dan video conference, aplikasi mobile edukasi, perangkat lunak simulasi, pustaka digital	2025	<b>Lv.3.1.1.D3</b> Melakukan kampanye kesadaran dan keselamatan; Pelatihan pengemudi dan pengguna transportasi; Kampanye kesadaran publik	2025
		<b>Lv.3.1.1.A4</b> Membentuk tim Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan SI-PELARI	2026	<b>Lv.3.1.1.B4</b> Melakukan pengadaan komputer PC/Laptop, Software manajemen kinerja organisasi, manajemen SDM, perangkat lunak survei, manajemen kualitas	2026	<b>Lv.3.1.1.C4</b> Mengembangkan sistem informasi geografis, pusat pemantauan transportasi, sistem penghitung kendaraan	2026	<b>Lv.3.1.1.D4</b> Mengumpulkan data yang tepat, pendidikan dan pelatihan, Pelaporan dan komunikasi, keterlibatan ahli eksternal	2026

Sumber: Analisis Tim, 2023

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, dimensi smart living memiliki inovasi yang strategis terutama di bidang kesehatan, yaitu SIPAKATAU-KI, SI CETAR, dan Rumah Kurcaci. Semuanya merupakan upaya dalam memberikan pelayanan yang cepat dan nyaman terkait dengan kesehatan. SIPAKATAU-KI akan mengintegrasikan beberapa aplikasi kesehatan yang sudah ada saat ini untuk diintegrasikan sehingga memudahkan pengguna untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang optimal. Begitu pula dengan SI-CETAR yang merupakan inovasi untuk memperbaiki birokrasi di lingkungan Dinas Kesehatan. Sedangkan rumah kurcaci merupakan suatu inovasi yang dimiliki oleh Rumah Sakit BATARA GURU dalam memberikan pelayanan yang nyaman kepada keluarga pasien dengan menyediakan tempat atau ruang tunggu dengan fasilitas yang memadai. Hal ini didasarkan atas posisi rumah sakit yang merupakan rumah sakit rujukan bagi kabupaten/kota sekitar, sehingga banyak keluarga pasien yang tidak memiliki tempat tinggal sementara saat menunggu pasien. Untuk itu, pihak pengelola rumah sakit kemudian menyediakan hunian yang disebut Rumah Kurcaci di halaman rumah sakit untuk keluarga pasien. Namun, saat ini Rumah Kurcaci masih terkendala dengan sistem penempatan yang belum teratur, sehingga dengan penyusunan master plan smart city ini diharapkan akan ada sistem yang berguna untuk mengatur sistem hunian di Rumah Kurcaci tersebut. Diperkirakan pengembangan lanjutan ini selesai di tahun 2025.

#### 4.5 RENCANA AKSI SMART SOCIETY

Pada dimensi smart society, isu yang ingin diselesaikan adalah masalah peningkatan kompetensi sumber daya manusia terutama di angkatan kerja dan masalah kesejahteraan sosial seperti stunting dan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan sosial. Kebanyakan inovasi yang digagas pada dimensi smart society dimulai di tahun 2023 dan diharapkan mulai dapat disosialisasikan di tahun 2024.

Pada subdimensi interaksi masyarakat, pelestarian budaya menjadi isu penting di Kabupaten Luwu, terutama di tingkat generasi muda. Untuk itu, dibuatlah program pelestarian budaya yang diberi nama SIDELU (Sistem Informasi Desa Luwu yang berisikan informasi kelompok budaya dan kebudayaan, termasuk peninggalan sejarah yang ada di desa tersebut. Program ini menggandeng generasi muda yang tergabung dalam kelompok kesenian, termasuk karang taruna untuk memberikan pengenalan mengenai budaya Luwu. Program ini direncanakan dimulai di tahun 2023 dan diharapkan dapat disosialisasikan di tahun 2024.

Untuk dimensi ekosistem pendidikan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia menjadi fokus inovasi. Adalah jobsmart yang direncanakan menjadi platform yang memberikan informasi mengenai peluang kerja, termasuk pelatihan yang dibutuhkan agar kompetensi yang dimiliki sesuai dengan kebutuhan pasar. Program ini secara dasar sudah ada, misalnya dengan penerbitan kartu pencari kerja, namun program ini dianggap kurang maksimal dalam menempatkan pekerja sesuai dengan kompetensinya. Untuk itu jobsmart direncanakan akan dimulai di tahun 2023 dan direncanakan sudah dapat disosialisasikan di tahun 2025.

**Tabel 18 Rencana Aksi Smart Society**

Strategi	Nama Inovasi	Rencana Aksi/Tahun							
		Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun
<b>S.1 INTERAKSI MASYARAKAT</b>									
S.1.1.1 Meningkatkan kapasitas kelembagaan adat desa RT/RW, Karang Taruna, LPM dan Posyandu	<b>SIDELU</b> (Sistem Informasi Desa Luwu) Pelestarian Budaya Desa Buntu Matabbing	<b>S.1.1.1.A1</b> Melaksanakan Perbup No.97 Tahun 2022 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan	2023	<b>S.1.1.1.B1</b> Memastikan terbentuknya lembaga Adat dan tersedianya fasilitas yang diperlukan	2024	<b>S.1.1.1.C1</b> Membangun dukungan data aplikasi SIDELU = Sistem Informasi Desa Luwu dan diintegrasikan dengan perangkat daerah terkait	2024	<b>S.1.1.1.D1</b> Melakukan sosialisasi dan penyuluhan	2024
<b>S.2 EKOSISTEM BELAJAR</b>									
S.2.1.1 Optimalisasi pelatihan berbasis kebutuhan pasar kerja	<b>JOB SMART</b> (Sistem penguatan kompetensi tenaga kerja terintegrasi)	<b>S.2.1.1.A1</b> Menyusun ranperda tentang pengelolaan Ketenagakerjaan (perlu dukungan Perbup)	2023	<b>S.2.1.1.B1</b> Memastikan penyediaan Komputer, Jaringan Internet, Perlalatan dan Perlengkapan Kantor	2024	<b>S.2.1.1.C1</b> Mengembangkan pelayanan konsultasi karir dengan Aplikasi KOPER KERJA (Konsultasi Pencari Kerja)	2024	<b>S.2.1.1.D1</b> Melakukan sosialisasi dan iklan melalui sosial media	2025

Strategi	Nama Inovasi	Rencana Aksi/Tahun							
		Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun
<b>S.3 SISTEM KEAMANAN MASYARAKAT</b>									
S.3.1.1 Peningkatan kinerja kader dalam pendampingan Ibu Hamil dan Pasangan Usia Subur	<b>PENTING</b> (Petugas Anti Stunting )	<b>S.3.1.1.A1</b> Melaksanakan SK Bupati Nomor : 72/I/2023 tentang Pengangkatan Tenaga Petugas Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) dan Sub Pengangkatan Tenaga Petugas Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (Sub PPKBD) Kabupaten Luwu TA. 2023	2023	<b>S.3.1.1.B1</b> Membangun Balai Penyuluhan KB, Rumah Data, Komputer, dan Jaringan Internet.	2024	<b>S.3.1.1.C1</b> Mengembangkan sistem Informasi Keluarga (SIGA) dan Sistem Elektronik Siap Nikah-Siap hamil (Elsimil)	2024	<b>S.3.1.1.D1</b> Melakukan sosialisasi dan Penyuluhan	2024
S.3.1.2 Meningkatkan layanan bantuan untuk pemenuhan kebutuhan dasar bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	<b>SIPANDU PPKS</b> (Sistem Informasi Pendaftaran Penduduk bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial)	<b>S.3.1.2.A1</b> Penyusun SK Kepala Dinas tentang Tim Kerja SIPANDU (perlu dukungan Perda/Perbup)	2023	<b>S.3.1.2.B1</b> Menyediakan Komputer, Jaringan Internet, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2024	<b>S.3.1.2.C1</b> Mengembangkan SIPANDU terintegrasi pada setiap desa/kelurahan	2024	<b>S.3.1.2.D1</b> Melakukan sosialisasi dan Penyuluhan	2024
		<b>S.3.1.2.A2</b> Memastikan Pernyataan Dukungan Kepala Daerah dalam Rencana Aksi Perubahan Latpim 3 dan SK Kepala OPD	2022	<b>S.3.1.2.B2</b> Menyediakan Komputer, Jaringan Internet, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2022	<b>S.3.1.2.C2</b> Melakukan pengadaan DTKS Modul PBI	2022	<b>S.3.1.2.D2</b> Melakukan sosialisasi dan Penyuluhan	2022

Sumber: Analisis Tim, 2023

Sedangkan untuk subdimensi keamanan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Luwu berfokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan membentuk PENTING (Petugas Anti Stunting) yang akan memberikan pelayanan kepada ibu hamil dan pasangan usia subur dalam merencanakan dan mempersiapkan kehamilan, termasuk hal-hal penting yang perlu diperhatikan agar bayi yang lahir tidak mengalami pertumbuhan yang lambat. Selain itu, ada juga SIPANDU PPKS yang menasar masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesejahteraan, seperti masyarakat miskin, masyarakat dengan masalah kesehatan mental dan gangguan jiwa. Sedua inovasi ini direncanakan dimulai di tahun 2023 untuk penyiapan kelembagaan dan kebijakannya, sedangkan untuk sosialisasi dilakukan di tahun 2024.

**4.6 RENCANA AKSI SMART ENVIRONMENT**

Dimensi smart environment memiliki cukup banyak inovasi dalam mengatasi permasalahan lingkungan di Kabupaten Luwu. Namun, inovasi ini sebenarnya saling berkaitan dan mendukung dalam suatu rangkaian proses pencapaian tujuan dan sasaran yang direncanakan. Dalam hal proteksi lingkungan hidup, ada inovasi seperti penataan ruang, pembangunan ruang terbuka hijau, hingga memastikan uji emisi kendaraan bermotor. Semua program ini direncanakan di tahun 2024 mulai dari pengembangan kebijakan dan kelembagaan, penyediaan infrastruktur pendukung, penyediaan perangkat lunak pendukung, hingga penguatan literasi.

**Tabel 19 Rencana Aksi Smart Environment**

Strategi	Nama Inovasi	Rencana Aksi / Tahun							
		Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun
<b>En.1 PROTEKSI LINGKUNGAN</b>									
En.1.1.1 Mengoptimalkan implementasi kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta manajemen penanggulangan bencana	<b>RPPLH</b> (Dokumen Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan LH)	<b>En.1.1.1.A1</b> Menyusun Peraturan Daerah Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan LH (RPPLH)	2024	-	-	<b>En.1.1.1.C1</b> Komputer PC/Laptop, Software manajemen kinerja organisasi, manajemen SDM, perangkat lunak survei, manajemen kualitas	2024	<b>En.1.1.1.D1</b> Forum diskusi dan konsultasi publik	2024
	<b>KLHS</b> (Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis)	<b>En.1.1.1.A2</b> Menyusun Regulasi Tentang Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	2024	-	-	<b>En.1.1.1.B2</b> Melakukan pengadaan komputer PC/Laptop, Software manajemen kinerja organisasi, manajemen SDM, perangkat lunak survei, manajemen kualitas	2024	<b>En.1.1.1.D2</b> Membangun forum diskusi dan konsultasi publik	2024
	<b>MUKA BEMOR</b> (MOBIL UJI EMISI KENDARAAN BERMOTOR KELILING)	<b>En.1.1.1.A3</b> Mendeteksi emisi gas buang kendaraan bermotor, mengurangi potensi penurunan kualitas udara akibat polusi kendaraan bermotor	2024	<b>En.1.1.1.B1</b> Memastikan adanya Kendaraan Roda 4 / Roda 6 yang diuji	2024	<b>En.1.1.1.B3</b> Melakukan pengadaan komputer PC/Laptop, Software manajemen kinerja organisasi, manajemen SDM, perangkat lunak survei, manajemen kualitas	2024	<b>En.1.1.1.D3</b> Melakukan pengembangan dan edukasi kepada petugas dan masyarakat	2024

Strategi	Nama Inovasi	Rencana Aksi / Tahun							
		Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun
	<b>SI-IKLH</b> (SISTEM INFORMASI INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH)	<b>En.1.1.1.A4</b> Menyusun dokumen sarana pengendalian indeks kualitas lingkungan hidup	2024	-	-	<b>En.1.1.1.B4</b> Melakukan pengadaan komputer PC/Laptop, Software manajemen kinerja organisasi, manajemen SDM, perangkat lunak survei, manajemen kualitas	2024	<b>En.1.1.1.D4</b> Melakukan pengembangan dan edukasi	2024
	<b>Pembangunan Taman Kota, Jalur Hijau</b>	<b>En.1.1.1.A5</b> Menyusun rencana Penambahan Ruang Terbuka Hijau Minimal 30%	2024	<b>En.1.1.1.B2</b> Memastikan adanya lahan kota, Infrastruktur Jalan	2024	-	-	<b>En.1.1.1.D5</b> Melakukan pengembangan dan edukasi	2024
<b>En.2 PENGELOLAAN SAMPAH DAN LIMBAH</b>									
En.2.1.1 Mengupayakan pemenuhan infrastruktur dalam rangka penyehatan lingkungan yang berkualitas	<b>Pembangunan TPA Tanjong Kec. Bupon, Pembangunan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu Sistem Reduce, Reuse dan Recycle (TPS3R)</b>	<b>En.2.1.1.A1</b> Memastikan sistem sarana Pengelolaan Sampah Masyarakat	2024	<b>En.2.1.1.B1</b> Memastikan pengadaan lahan yang jauh dari permukiman, akses jalan	2024	-	-	<b>En.2.1.1.D1</b> Melakukan pelatihan dan pengembangan	2024
	<b>Pembangunan Pusat Daur Ulang, Bank Sampah Induk Daerah</b>	<b>En.2.1.1.A2</b> Penyusun aturan penyediaan Sarana Pusat daur ulang sampah yang di kelola oleh PEMDA	2024	<b>En.2.1.1.B2</b> Memastikan pengadaan lahan yang jauh dari permukiman, akses jalan	2024	-	-	<b>En.2.1.1.D2</b> Melakukan pelatihan dan pengembangan	2024
	<b>Penyediaan Anggaran</b>	<b>En.2.1.1.A3</b> Menyusun Kebijakan Penambahan Anggaran Pengelolaan Persampahan	2024	-	-	-	-	<b>En.2.1.1.D3</b> Melakukan koordinasi dengan TAPD	2024

Strategi	Nama Inovasi	Rencana Aksi / Tahun							
		Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun
En.2.1.2 Mendorong keterlibatan masyarakat dalam rangka mengefektifkan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun dan timbulan	<b>SI SALIM</b> (SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN SAMPAH DAN LIMBAH)	<b>En.2.1.2.A1</b> Menyusun Regulasi Tentang Informasi Pengelolaan Sampah dan Limbah	2024	<b>En.2.1.2.B1</b> Penentuan peran dan tanggungjawab, melibatkan multidisipliner, koordinasi dan kolaborasi	2024	<b>En.2.1.2.C1</b> Memastikan tersedianya perangkat lunak, software pendukung	2024	<b>En.2.1.2.D1</b> Melakukan pelatihan dan pengembangan	2024
		<b>En.2.1.2.A2</b> Membentuk Tim Percepatan terwujudnya SI-MONEV B3	2024	<b>En.2.1.2.B2</b> Menyusun penentuan peran dan tanggungjawab, melibatkan multidisipliner, koordinasi dan kolaborasi	2024	<b>En.2.1.2.C2</b> Memastikan tersedianya perangkat lunak, software pendukung	2024	<b>En.2.1.2.D2</b> Melakukan pelatihan dan pengembangan	2024
	<b>SI-MONEV B3</b> (SISTEM MONITORING DAN EVALUASI LIMBAH B3)	<b>En.2.1.2.A3</b> Membangun dasar hukum SI - MONEV B3	2024	<b>En.2.1.2.B3</b> Melakukan pengadaan tenaga IT, Server	2024	<b>En.2.1.2.C3</b> Memastikan tersedianya perangkat lunak, hardware pendukung	2024	<b>En.2.1.2.D3</b> Melakukan pengembangan dan edukasi	2024
		<b>En.2.1.2.A4</b> Pembuatan Regulasi Penerapan SI-MONEV	2025	<b>En.2.1.2.B4</b> Melibatkan stakeholder penyusunan regulasi SI-MONEV	2025	<b>En.2.1.2.C4</b> Memastikan tersedianya laptop dan PC	2025	<b>En.2.1.2.D4</b> Membangun forum diskusi dan konsultasi publik	2025
		<b>En.2.1.2.A5</b> Sosialisasi SI-MONEV B3	2026	<b>En.2.1.2.B5</b> Melibatkan stakeholder	2026	<b>En.2.1.2.C5</b> Melakukan pengadaan media sosial, baliho	2026	<b>En.2.1.2.D5</b> Mengadakan workshop dan sosialisasi	2026
		<b>En.2.1.2.A6</b> Pelaksanaan SI-MONEV B3	2026	<b>En.2.1.2.B6</b> Membangun sistem pelaporan dan komunikasi	2026	<b>En.2.1.2.C6</b> Melakukan pengadaan komputer PC/Laptop, Software manajemen kinerja organisasi, manajemen SDM, perangkat lunak survei, manajemen kualitas	2026	<b>En.2.1.2.D6</b> Melibatkan stakeholder terkait	2026

Strategi	Nama Inovasi	Rencana Aksi / Tahun							
		Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun
		<b>En.2.1.2.A7</b> Melakukan Monitoring dan Evaluasi SI-MONEV B3	2027	<b>En.2.1.2.B7</b> Membangun ekosistem yang melibatkan akademisi dan stakeholder terkait	2027	<b>En.2.1.2.C7</b> Komputer PC/Laptop, Software manajemen kinerja organisasi, manajemen SDM, perangkat lunak survei, manajemen kualitas	2027	<b>En.2.1.2.D7</b> Memastikan disosialisasikannya aplikasi monitoring manajemen	2026
		<b>En.2.1.2.A8</b> Mengembangkan Fitur dan Pendukung SI-MONEV	2027	<b>En.2.1.2.B8</b> Memastikan ketersediaan teknologi informasi dan infrastruktur	2027	<b>En.2.1.2.C8</b> Mengembangkan Sistem Manajamaen basis data, aplikasi pelaporan	2027	<b>En.2.1.2.D8</b> Melakukan penyesuaian cara penyampaian ke masyarakat	2026
	<b>Pembangunan Pusat Penyimpanan Sementara Limbah B3 PEMDA</b>	<b>En.2.1.2.A9</b> Pengembangan Fitur dan Pendukung	2027	<b>En.2.1.2.B9</b> Memastikan tersedianya teknologi informasi dan infrastruktur	2027	<b>En.2.1.2.C9</b> Mengembangkan Sistem Manajamaen basis data, aplikasi pelaporan	2027	<b>En.2.1.2.D9</b> Melakukan penyesuaian cara penyampaian ke masyarakat	2026
<b>En.3 TATA KELOLA ENERGI</b>									
En.3.1.1 Mendorong Pengelolaan Sampah Untuk Menjadi Sumber Energi Alternatif	<b>INSTAN-TPA</b> (INSTALASI PENGELOLAAN GAS METAN PADA TPA)	<b>En.3.1.1.A1</b> Mendorong Penetapan Kebijakan dan Regulasi Tentang Pemanfaatan Gas Metan	2024	-	2024	<b>En.3.1.1.C1</b> Melakukan pengadaan komputer PC/Laptop, Software manajemen kinerja organisasi, manajemen SDM, perangkat lunak survei, manajemen kualitas	2024	<b>En.3.1.1.D1</b> Membangun forum diskusi dan konsultasi publik	2024
		<b>En.3.1.1.A2</b> Menyusun dokumen Pemanfaatan Limbah sebagai sarana penunjang kebutuhan masyarakat	2024	<b>En.3.1.1.B1</b> Memastikan tersedianya Sarana dan Prasana	2024	-	-	<b>En.3.1.1.D2</b> Melakukan pelatihan dan pengembangan	2024

Sumber: Analisis Tim, 2023

Sedangkan untuk pengelolaan limbah, terdapat SI SALIM yang dapat memberikan informasi mengenai sistem pengelolaan sampah di suatu wilayah. Pada tingkat industri, pengelolaan limbah B3 juga direncanakan dengan pembangunan pusat penyimpanan sementara limbah B3 sebelum dapat dibuang ke lingkungan. Namun untuk inovasi ini baru akan dimulai di tahun 2027. Untuk tahun 2024, baru akan dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap limbah B3 sekaligus sebagai penilaian proses yang nantinya diperlukan dan besaran pengolahan yang diperlukan. Untuk tata kelola energi, sebagai lanjutan dalam pengelolaan limbah, untuk limbah organik diharapkan dilakukan pengolahan untuk menjadi sumber energi terbarukan.



# 5

---

## PETA JALAN PEMBANGUNAN SMART CITY

KABUPATEN LUWU

Peta jalan smart city menunjukkan bagaimana suatu program dijalankan setiap tahunnya. Hal yang ditunjukkan adalah berupa indikator kinerja, keterhubungannya dengan SNI kota cerdas dan target capaian setiap tahun, termasuk besaran biaya yang dibutuhkan dalam pencapaian tujuan. Peta jalan dibuat dalam durasi 10 tahun dimana durasi tersebut dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu:

1. Perencanaan Jangka Pendek

Perencanaan jangka pendek adalah perencanaan yang dapat dilihat perkembangannya dalam jangka waktu 1 tahun. Dalam Master Plan Smart City Kabupaten Luwu ini, perencanaan jangka pendek adalah perencanaan di tahun 2024

2. Perencanaan Jangka Menengah

Merupakan perencanaan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak dokumen master plan ini dibuat. Dalam hal ini, perencanaan yang dimaksud adalah perencanaan di tahun 2025 hingga tahun 2028. Pada jangka waktu ini, setiap target capaian dan rencana anggaran dituliskan untuk setiap tahunnya.

3. Perencanaan Jangka Panjang

Merupakan perencanaan dalam 10 (sepuluh) tahun ke depan sejak master plan smart city Kabupaten Luwu disusun, yaitu 2029-2033. Berbeda dengan perencanaan jangka menengah yang ditulis target capaian dan anggaran per tahun, perencanaan jangka panjang ditulis langsung dalam 5 (tahun) perencanaan.

Berikut adalah peta jalan smart city Kabupaten Luwu yang dijabarkan dalam masing-masing dimensi smart city.

**5.1 PETA JALAN SMART GOVERNANCE**

Pada dimensi smart governance terdapat 3 (tiga) inovasi yang dimunculkan, yaitu Bahasa Cinta untuk subdimensi pelayanan publik, SINDIKAT untuk subdimensi birokrasi yang efisien, dan Sistem Informasi Produk Hukum Daerah yang menjadi andalan subdimensi kebijakan publik yang efisien. Berikut adalah peta jalan pembangunan smart city Kabupaten Luwu untuk dimensi smart governance.

**Tabel 20 Peta Jalan Jangka Pendek dan Jangka Menengah Smart Governance**

Strategi	Program		Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector
		Kegiatan				Jangka Pendek		Jangka Menengah									
						2024		2025		2026		2027		2028			
						Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.		
<b>G.1 PELAYANAN PUBLIK</b>																	
<b>G.1.1.1</b> Meningkatkan persentase data pemenuhan data dokumen kependudukan	<b>G.1.1.1.P1</b> Program Pendaftaran Penduduk		Jumlah unit pelayanan pendaftaran penduduk	SNI 10.1 Jumlah kunjungn daring tahunan ke portal data terbuka per 100.000 penduduk	<b>Bahasa Cinta</b> (Bayi Harus Aktif dan Pencatatan, identitas dan Jaminan Kesehatannya)	3 unit	978	3 unit	978	3 unit	978	3 unit	978	978	979	APBD	Dinas Dukcapil
		Pelayanan Pendaftaran Penduduk															
		Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk															
			SNI 10.2 Persentase layanan yang dapat diakses dan diminta secara daring	Merupakan sebuah inovasi untuk melakukan pendataan langsung terhadap bayi yang baru lahir sehingga mendapatkan haknya yang mendukung tumbuh kembang, seperti pendampingan kesehatan dan pendidikan yang layak													
			SNI 10.3 Rata-rata waktu respon terhadap pertanyaan yang dilakukan melalui sistem penyelidikan non-darurat (hari)														

Strategi	Program		Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector
	Kegiatan	Sub Kegiatan				Jangka Pendek		Jangka Menengah									
						2024		2025		2026		2027		2028			
						Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.		
<b>G.2 BIROKRASI YANG EFISIEN</b>																	
G.2.1.1 Meningkatkan inovasi pelayanan publik melalui pengembangan sumber daya manusia yang kompeten	G.2.1.1.P1 Program Pengembangan Sumber Daya Manusia		jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi	SNI 6.3 Jumlah tingkat pendidikan tinggi sains, teknologi, teknik, dan matematika (STEM) per 100.000 penduduk	SINDIKAT (Sistem informasi pendidikan dan Pelatihan) adalah inovasi untuk mendukung peningkatan kualitas pegawai pemerintahan dengan menampilkan berbagai informasi yang terkait dengan pendidikan dan latihan bagi pegawai	120	350	120	357	120	364	120	371	120	379	APBD	BKPSDM Luwu
	Bimtek tenaga ASN sesuai dengan kebutuhan Organisasi	Penyelenggaraan pengembangan kompetensi Teknis urusan pemerintahan konkuren, perangkat daerah penunjang dan urusan pemerintahan umum															
<b>G.3 KEBIJAKAN PUBLIK YANG EFISIEN</b>																	
G.3.1.1 Meningkatkan pemahaman terhadap produk hukum daerah	G.3.1.1.P1 Penataan Peraturan Perundang-undangan		Persentase Produk hukum yang termuat dalam JDIH	SNI 5.1 Persentase kontrak layanan yang menyediakan layanan yang memuat kebijakan data terbuka	JDIH (Sistem Informasi Produk Hukum Daerah) adalah sebuah database yang berisikan berbagai kebijakan pemerintah yang dapat diakses oleh publik	95%	420	95%	420	95%	420	95%	420	95%	420	APBD	Bagian Hukum Sekretariat Daerah
	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Pendokumentasian prodk hukum dan pengelolaan informasi hukum															

Sumber: Analisis Tim, 2023

**Tabel 21 Peta Jalan Jangka Panjang Smart Governance**

Strategi	Program		Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector
	Kegiatan					Jangka Panjang											
	Sub Kegiatan					2029		2030		2031		2032		2033			
						Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.		
<b>G.1 PELAYANAN PUBLIK</b>																	
<b>G.1.1.1</b> Meningkatkan persentase data pemenuhan data dokumen kependudukan	<b>G.1.1.1.P1</b> Program Pendaftaran Penduduk		Jumlah unit pelayanan pendaftaran penduduk	SNI 10.1 Jumlah kunjungn daring tahunan ke portal data terbuka per 100.000 penduduk	<b>Bahasa Cinta</b> (Bayi Harus Aktif dan Pencatatan, identitas dan Jaminan Kesehatannya)	3 unit	978	3 unit	998	3 unit	1.018	3 unit	1.038	3 unit	1.059	APBD	Dinas Dukcapil
	Pelayanan Pendaftaran Penduduk																
	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk			SNI 10.2 Persentase layanan yang dapat diakses dan diminta secara daring	Merupakan sebuah inovasi untuk melakukan pendataan langsung terhadap bayi yang baru lahir sehingga mendapatkan haknya yang mendukung tumbuh kembang, seperti pendampingan kesehatan dan pendidikan yang layak												
				SNI 10.3 Rata-rata waktu respon terhadap pertanyaan yang dilakukan melalui sistem penyelidikan non-darurat (hari)													
<b>G.2 BIROKRASI YANG EFISIEN</b>																	
<b>G.2.1.1</b> Meningkatkan inovasi	<b>G.2.1.1.P1</b> Program Pengembangan Sumber Daya Manusia		jumlah ASN yang mengikuti	SNI 6.3 Jumlah tingkat	<b>SINDIKAT</b> (Sistem informasi pendidikan dan	120	379	120	387	120	394	120	402	120	410	APBD	BKPSDM Luwu

Strategi	Program		Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector	
	Kegiatan	Sub Kegiatan				Jangka Panjang												
						2029		2030		2031		2032		2033				
						Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.			
pelayanan publik melalui pengembangan sumber daya manusia yang kompeten	Bimtek tenaga ASN sesuai dengan kebutuhan Organisasi		pengembangan kompetensi	pendidikan tinggi sains, teknologi, teknik, dan matematika (STEM) per 100.000 penduduk	Pelatihan) adalah inovasi untuk mendukung peningkatan kualitas pegawai pemerintahan dengan menampilkan berbagai informasi yang terkait dengan pendidikan dan latihan bagi pegawai													
	Penyelenggaraan pengembangan kompetensi Teknis urusan pemerintahan konkuren, perangkat daerah penunjang dan urusan pemerintahan umum																	
<b>G.3 KEBIJAKAN PUBLIK YANG EFISIEN</b>																		
G.3.1.1 Meningkatkan pemahaman terhadap produk hukum daerah	G.3.1.1.P1 Penataan Peraturan Perundang-undangan		Persentase Produk hukum yang termuat dalam JDIH	SNI 5.1 Persentase kontrak layanan yang menyediakan layanan yang memuat kebijakan data terbuka	JDIH (Sistem Informasi Produk Hukum Daerah) adalah sebuah database yang berisikan berbagai kebijakan pemerintah yang dapat diakses oleh publik													
	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum					95%	420	95%	428	95%	437	95%	446	95%	455	APBD	Bagian Hukum Sekretariat Daerah	
	Pendokumentasian prodk hukum dan pengelolaan informasi hukum																	

Sumber: Analisis Tim, 2023

Untuk inovasi Bahasa Cinta, Pemerintah Kabupaten Luwu menargetkan ada 3 (tiga) unit pelayanan yang berfungsi setiap tahunnya untuk memastikan pelayanan berjalan dengan optimal. Anggaran direncanakan berasal dari Dana Alokasi Khusus Non Fisik dimana leading sektorny adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Sementara itu, untuk pelatihan dan pendidikan ASN, ditargetkan setiap tahunnya terdapat 120 orang yang dapat mengikuti pelatihan dan pendidikan ini. Sumber anggaran direncanakan dari APBD Kabupaten Luwu. Sedangkan leading sektornya adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Luwu. Untuk Sistem Informasi Produk Hukum Daerah akan dipimpin oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah dimana ditargetkan 95% produk hukum termuat setiap tahunnya dalam portal JDIH Kabupaten Luwu.

**5.2 PETA JALAN SMART BRANDING**

Terdapat 5 (lima) inovasi yang direncanakan pada msart branding dimana peningkatan pariwisata, peningkatan iklim bisnis, dan menciptakan karakter wajah kota menjadi subdimensi yang harus dipenuhi. Pada promosi wisata secara digital dan rebranding destinasi wisata ditargetkan pada tahun pertama terdapat 13.000 orang yang berkunjung ke destinasi wisata di Kabupaten Luwu. Terdapat juga inovasi EXPLORE BONGLO yang merupakan upaya pemerintah untuk menyajikan tempat wisata baru di Kabupaten Luwu Selanjutnya dilakukan pengembangan aplikasi yang diharapkan mencapai 100% pada perencanaan jangka menengah, sehingga pada perencanaan jangka panjang, aplikasi hanya perlu perawatan. Dana yang dibutuhkan didukung dari APBD dengan pimpinan program adalah Dinas Kepariwisata dan Kebudayaan. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah peta jalan smart city Kabupaten Luwu untuk dimensi smart branding.

**Tabel 22 Peta Jalan Jangka Pendek dan Jangka Menengah Smart Branding**

Strategi	Program		Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector
	Kegiatan					Jangka Pendek					Jangka Menengah						
	Sub Kegiatan					2024		2025		2026		2027		2028			
						Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.		
<b>B.1 PARIWISATA</b>																	
B.1.1.1 Membangun dan mengembangkan destinasi wisata yang inklusif dan berkelanjutan	B.1.1.1.P1 Pemasaran Pariwisata		Jumlah Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik dalam dan Luar Negeri yang dilakukan	SNI 14.1 Persentase layanan rekreasi publik yang dapat dipesan secara daring	Promosi wisata digital dan rebranding destinasi wisata  adalah inovasi yang dikembangkan sebagai upaya untuk memperkenalkan berbagai destinasi dan atraksi wisata di Kabupaten Luwu yang dapat diakses oleh publik secara digital	13,000 Orang	250	13,000 Orang	300	13,500 Orang	350	14,000 Orang	400	14,500 Orang	450	APBD	Dinas Kepariwisata dan Kebudayaan
	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik dalam dan Luar Negeri			SNI 17.1 Jumlah pesanan daring untuk fasilitas budaya per 100.000 penduduk													
	Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata		Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Kabupaten/Kota		EXPLORE BONGLO (Pengembangan Objek Wisata)	6000 Orang	3500	7000 Orang	4000	8000 Orang	4500	9000 Orang	5000	10000 Orang	5500	APBD	Dinas Kepariwisata dan Kebudayaan

Strategi	Program		Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector				
	Kegiatan					Jangka Pendek		Jangka Menengah													
	Sub Kegiatan					2024		2025		2026		2027		2028							
	Target Kinerja	Angg.				Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.								
	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota		Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)		Bonglo)  Adalah program untuk mengembangkan salah satu potensi pariwisata strategis di Kabupaten Luwu yaitu Bonglo sebagai salah satu destinasi unggulan																
	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota																				
<b>B.2 EKOSISTEM BISNIS</b>																					
<b>B.2.1.1</b> Menghadirkan platform dashboard dan portal Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang informatif dan interaktif	<b>B.2.1.1.P1</b> Penguatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan berusaha		Jumlah Laporan Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha	SNI 5.2 Tingkat kelangsungan bisnis baru per 100.000 penduduk	<b>OSS</b> (Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko)  adalah sebuah inovasi untuk memudahkan para pengusaha dalam mengurus perizinan usahanya dan memudahkan pemerintah dalam pengawasan dan pemantauan izin usaha yang dapat diakses secara digital																
	Sosialisasi Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik																				
	Pelaksanaan Sistem Informasi Perizinan Berusaha berbasis risiko					1 Sistem	50	1 Sistem	70	1 Sistem	75	1 Sistem	80	1 Sistem	85	APBD	Dinas Penanaman Modal dan PTSP				

Strategi	Program		Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector
	Kegiatan					Jangka Pendek		Jangka Menengah									
	Sub Kegiatan					2024		2025		2026		2027		2028			
	Target Kinerja	Angg.				Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.				
<b>B.3 WAJAH KOTA</b>																	
B.3.1.1 Menjadikan tampilan Kabupaten Luwu yang menarik dan berkarakter	B.3.1.1.P1 Penataan Bangunan dan Lingkungannya		Cakupan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya	SNI 5.2 Tingkat kelangsungan bisnis baru per 100.000 penduduk	Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik  adalah salah satu representasi dari kemudahan pelayanan publik di Kabupaten Luwu yang dibuat dengan menampilkan ciri khas Luwu dalam konsep bangunan dan desain di dalamnya	100%	2.000	100%	800	100%	800	100%	800	100%	800	APBD	Dinas PUPR
	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota					100%	2.000	100%	800	100%	800	100%	800	100%	800		
B.3.1.2 Mengembangkan IKM Barimbing	B.3.1.2.P1 Pengembangan Usaha Mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil		Cakupan penyelenggaraan pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil	SNI 5.2 Tingkat kelangsungan bisnis baru per 100.000 penduduk	IKM Barimbing sebagai rest area sebagai fasilitas pengguna jalan yang melintasi Kab. Luwu  sebuah bangunan ikonik yang berada di jalan lintas antar kabupaten dan provinsi sehingga menjadi ciri khas Kabupaten Luwu	50%	500	25%	600	70%	700	70%	800	70%	800	APBD	Dinas Koperasi,UKM dan Perindustrian
	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM,					50%	500	25%	600	70%	700	70%	800	70%	800		
		Pelaksanaan Pengembangan Produksi, Pengolahan, Pemasaran dan SDM															

Sumber: Analisis Tim, 2023

Sementara itu, untuk subdimensi ekosistem bisnis, hadirnya inovasi SIPEMANDU/PTSP diharapkan dalam mengintegrasikan berbagai rencana investasi ke dalam 1 (satu) sistem. Rencana ini berlangsung mulai dari tahun depan dan diharapkan selesai di tahun yang sama. Sedangkan untuk perencanaan jangka panjang, sistem tersebut hanya memerlukan pemeliharaan agar tetap dapat berfungsi dengan optimal. Sumber dana berasal dari APBD dan dipimpin oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

Sedangkan, untuk subdimensi wajah kota, terdapat inovasi penyelenggaraan Mall Pelayanan Publik yang secara bangunannya menunjukkan karakter Luwu yang kuat. Bangunan ini sudah selesai dan siap dimanfaatkan pada masa perencanaan jangka pendek dengan dipimpin oleh Dnas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Selain itu, pengembangan IKM Barimbing juga menjadi salah satu yang membentuk wajah kota Kabupaten Luwu. Dengan desain yang cukup mencolok diharapkan dengan dilakukannya peningkatan beberapa fasilitas, galeri ini dapat berkembang kembali dan dimanfaatkan untuk menarik masyarakat yang melintas di jalan Trans Sulawesi dan memperkenalkan produk hasil olahan pengusaha dan UMKM di Kabupaten Luwu. Dengan tampilan yang cukup mencolok, IKM ini dapat menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung. Rencana pengembangan kembali IKM ini dilakukan secara bertahap dimana diperkirakan baru akan 100% pada masa perencanaan jangka panjang 2028-2033. Program ini dipimpin oleh Dinas Koperasi, UMKM, dan Perindustrian.

**Tabel 23 Peta Jalan Jangka Panjang Smart Branding**

Strategi	Program		Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector
	Kegiatan					Jangka Panjang											
	Sub Kegiatan					2029		2030		2031		2032		2033			
						Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.		
<b>B.1 PARIWISATA</b>																	
B.1.1.1 Membangun dan mengembangkan destinasi wisata yang inklusif dan berkelanjutan	B.1.1.1.P1 Pemasaran Pariwisata		Jumlah Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik dalam dan Luar Negeri yang dilakukan	SNI 14.1 Persentase layanan rekreasi publik yang dapat dipesan secara daring  SNI 17.1 Jumlah pesanan daring untuk fasilitas budaya per 100.000 penduduk  SNI 18.3 Persentase area yang dicakup oleh konektivitas internet yang disediakan kota	Promosi wisata digital dan rebranding destinasi wisata  adalah inovasi yang dikembangkan sebagai upaya untuk memperkenalkan berbagai destinasi dan atraksi wisata di Kabupaten Luwu yang dapat diakses oleh publik secara digital	15,000 Orang	500	15,000 Orang	510	15,000 Orang	520	15,000 Orang	531	15,000 Orang	541	APBD	Dinas Kepariwisata an dan Kebudayaan
	Pemasaran Pariwisata dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota																
	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik dalam dan Luar Negeri																
	Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata		Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Kabupaten/Ko		EXPLORE BONGLO (Pengembangan Objek Wisata	11.000 Orang	6.000	11.000 Orang	6.120	11.000 Orang	6.242	11.000 Orang	6.367	11.000 Orang	6.495	APBD	Dinas Kepariwisata an dan Kebudayaan

Strategi	Program		Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector
	Kegiatan					Jangka Panjang											
	Sub Kegiatan					2029		2030		2031		2032		2033			
	Target Kinerja	Angg.				Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.				
	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	ta Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)		Bonglo) Adalah program untuk mengembangkan salah satu potensi pariwisata strategis di Kabupaten Luwu yaitu Bonglo sebagai salah satu destinasi unggulan												
<b>B.2 EKOSISTEM BISNIS</b>																	
B.2.1.1 Menghadirkan platform dashboard dan portal Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang informatif dan interaktif	B.2.1.1.P1 Penguatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan berusaha		Jumlah Laporan Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha	SNI 5.2 Tingkat kelangsungan bisnis baru per 100.000 penduduk	OSS (Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko)  adalah sebuah inovasi untuk memudahkan para pengusaha dalam mengurus perizinan usahanya dan memudahkan pemerintah dalam pengawasan dan pemantauan izin usaha yang dapat diakses secara digital	1 Sistem	90	1 Sistem	92	1 Sistem	94	1 Sistem	96	1 Sistem	97	APBD	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
	Sosialisasi Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik																
	Pelaksanaan Sistem Informasi Perizinan Berusaha berbasis risiko																

Strategi	Program		Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector
	Kegiatan					Jangka Panjang											
	Sub Kegiatan					2029		2030		2031		2032		2033			
						Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.		
<b>B.3 WAJAH KOTA</b>																	
<b>B.3.1.1</b> Menjadikan tampilan Kabupaten Luwu yang menarik dan berkarakter	<b>B.3.1.1.P1</b> Penataan Bangunan dan Lingkungannya		Cakupan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya	SNI 5.2 Tingkat kelangsungan bisnis baru per 100.000 penduduk	<b>Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik</b>  adalah salah satu representasi dari kemudahan pelayanan publik di Kabupaten Luwu yang dibuat dengan menampilkan ciri khas Luwu dalam konsep bangunan dan desain di dalamnya	100% Aplikasi dan maintenance 300	100% Aplikasi dan maintenance 306	100% Aplikasi dan maintenance 312	100% Aplikasi dan maintenance 318	100% Aplikasi dan maintenance 325	APBD	Dinas PUPR					
	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota																
	Pelaksanaan Penyelenggaraan Pelayanan Publik																
<b>B.3.1.2</b> Mengembangkan IKM Barimbing	<b>B.3.1.2.P1</b> Pengembangan Usaha Mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil		Cakupan penyelenggaraan pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil	SNI 5.2 Tingkat kelangsungan bisnis baru per 100.000 penduduk	<b>IKM Barimbing sebagai rest area sebagai fasilitas pengguna jalan yang melintasi Kab. Luwu</b>  sebuah bangunan ikonik yang berada di jalan lintas antar kabupaten dan provinsi sehingga menjadi ciri khas Kabupaten Luwu	100% maintenance 1.000	100% maintenance 1.020	100% maintenance 1.040	100% maintenance 1.061	100% maintenance 1.082	APBD	Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian					
	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM,																
	Pelaksanaan Pengembangan Produksi, Pengolahan, Pemasaran dan SDM																

Sumber: Analisis Tim, 2023

**5.3 PETA JALAN SMART ECONOMY**

Pada dimensi ini terdapat cukup banyak inovasi yang dimunculkan. Terdapat 7 (tujuh) inovasi yang dimunculkan dengan fokus pada pengembangan UMKM seperti SiAP UMKM dan UGI (UMKM Go Internasional), pengembangan sektor pertanian dengan inovasi smart farming, dapur B2SA, dan SiBaPok, dan terdapat pula pengembangan sistem pembayaran nontunai yang dimulai dari penggunaan di lingkungan pemerintahan atau urusan pemerintahan. Berikut adalah inovasi -inovasi yang terkait dengan smart economy.

**Tabel 24 Peta Jalan Jangka Pendek dan Jangka Menengah Smart Economy**

Strategi	Program		Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector
	Kegiatan					Jangka Pendek					Jangka Menengah						
	Sub Kegiatan					2024		2025		2026		2027		2028			
						Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.		
<b>Ec.1 INDUSTRI YANG BERDAYA SAING</b>																	
<b>Ec.1.1.1</b> Mendorong pengembangan potensi koperasi dan UMKM, serta meningkatkan peran kelembagaan dan pengawasan	<b>Ec.1.1.1.P1</b> Program Peningkatan Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Prioritas)		Jumlah Dokumen data Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	SNI 5.2 Tingkat kelangsungan bisnis baru per 100.000 penduduk	<b>SiAP UMKM</b>  adalah inovasi yang dilakukan untuk memudahkan pemerintah dalam pendataan UMKM di Kabupaten Luwu sehingga mendapatkan kesempatan yang sama dalam pengembangan usaha ke depannya	50 Orang	264	100 Org	550	100 Org	578	100 Org	606	100 Org	637	APBD II	Dinas Koperasi, UMKM dan Perindustrian
	Pemberdayaan Kelembagaan, Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro																
	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro																
<b>Ec.1.2.1</b> Melaksanakan dan mengakselerasikan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dengan berfokus pada pada pengoptimalan sumber ekonomi unggulan daerah dan sector baru yang berkesesuaian dengan potensi	<b>Ec.1.2.1.P1</b> Meningkatkan Kemandirian Daya Saing dan Produktifitas Koperasi, UMKM dan Industri Kecil Menengah		Meningkatnya Kualitas SDM bagi Pelaku UMKM	UGI (UMKM Go Internasional)  adalah program yang dilakukan guna mempersiapkan UMKM dapat bersaing dalam pasar internasional melalui serangkaian pelatihan dan	50 Pelaku Usaha	200	70 Pelaku usaha	250	100 pelaku usaha	263	100 pelaku usaha	276	100 pelaku usaha	289	APBD II	Dinas Koperasi, UMKM dan Perindustrian	
	Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, Kemudahan, Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan para Pemangku Kepentingan																

Strategi	Program		Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector
	Kegiatan	Sub Kegiatan				Jangka Pendek		Jangka Menengah									
						2024		2025		2026		2027		2028			
						Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.		
sumber daya manusia dan sumber daya alam daerah		Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil Menengah			peningkatan kualitas SDM-nya												
<b>Ec.2 KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>																	
Ec.2.1.1 Meningkatkan jumlah dan kualitas sarana dan prasana pertanian	Ec.2.1.1.P1 PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		Cakupan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikroorganisme kewenangan Kabupaten/Kota	SNI 20.1 Persentase tahunan dari anggaran yang dihabiskan untuk inisiatif pertanian	Smart Farming adalah inovasi yang dikembangkan untuk mendukung peningkatan produktivitas pertanian menggunakan bantuan perkembangan TIK di bidang pertanian												
	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikroorganisme kewenangan Kabupaten/Kota					19 Ha	1283	20 Ha	1.500	20 Ha	1.500	20 Ha	1.500	20 Ha	1.500	APBD II	Dinas Pertanian
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pertanian																
Ec.2.1.2 Melakukan diversifikasi produk tanaman pangan	Ec.2.1.2.P1 Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan		Jumlah Kelompok Wanita yang Mengembangkan Kawasan Rumah Pangan Lestari		Dapur B2SA (Beragam Bergizi, Seimbang dan Aman) adalah pemberdayaan kelompok wanita dalam pengembangan program kawasan rumah pangan												
	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi					37 KWT	1786	50 KWT	2186	65 KWT	2486	65 KWT	2586	65 KWT	2686	APBD	Dinas Ketahanan Pangan

Strategi	Program		Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector
	Kegiatan	Sub Kegiatan				Jangka Pendek		Jangka Menengah									
						2024		2025		2026		2027		2028			
						Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.		
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal			lestari dan mendukung masyarakat dalam penyediaan makanan keluarga yang sehat dan berkualitas												
Ec.2.1.3 Mendorong penerapan kebijakan pengendalian dan distribusi perekonomian	Ec.2.1.3.P1 Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan yang dilaksanakan		Jumlah Laporan hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	SNI 5,4 Persentase Angkatan kerja yang bekerja di sektor pendidikan, penelitian, dan pengembangan	SiBapak (Sistem Informasi Bahan Pokok) adalah program terkait perdagangan yang memungkinkan semakin mudahnya pemantauan harga bahan pokok yang dapat diakses digital dan bersifat dua arah, sehingga mudah dilakukan pengambilan kebijakan terhadap kondisi pasar	1 dokumen	50	1 dok	50	1 dok	50	1 dok	50	1 dok	50	APBD	Bag Ekbang
	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian																
	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian																
<b>Ec.3 EKOSISTEM TRANSAKSI KEUANGAN</b>																	
Ec.3.1.1 Mempercepat pelaksanaan elektronifikasi transaksi di lingkungan	Ec.3.1.1.P1 Program Pengelolaan Pendapatan Daerah		Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	SNI 9.2 Persentase pembayaran yang dibayar secara elektronik	OTO QRIS merupakan program percepatan dan perluasan	100%	4.432	100%	4.654	100%	4.886	100%	5.131	100%	5.387	APBD	Bapenda
	Pengelolaan Pendapatan Daerah																

Strategi	Program		Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector
	Kegiatan	Sub Kegiatan				Jangka Pendek		Jangka Menengah									
						2024		2025		2026		2027		2028			
						Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.		
pelayanan publik pemerintah daerah		Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah		berdasarkan faktur elektronik	penggunaan QRIS yang saat ini difokuskan untuk pembayaran pajak daerah												
		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	SIPAREDA (Sistem Informasi Pajak dan Retribusi Daerah) adalah sistem yang menunjukkan keterbukaan informasi mengenai besaran pajak dan retribusi daerah		100%	4.432	100%	4.654	100%	4.886	100%	5.131	100%	5.387	APBD	
		Pengelolaan Pendapatan Daerah															
	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah																

Sumber: Analisis Tim, 2023

Tabel 25Peta Jalan Jangka Panjang Smart Economy

Strategi	Program		Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector
	Kegiatan	Sub Kegiatan				Jangka Panjang											
						2029		2030		2031		2032		2033			
						Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.		
<b>Ec.1 INDUSTRI YANG BERDAYA SAING</b>																	
<b>Ec.1.1.1</b> Mendorong pengembangan potensi koperasi dan UMKM, serta meningkatkan	<b>Ec.1.1.1.P1</b> Program Peningkatan Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Prioritas)	Jumlah Dokumen data Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	SNI 5.2 Tingkat kelangsungan bisnis baru per 100.000 penduduk	<b>SiAP UMKM</b> adalah inovasi yang dilakukan untuk memudahkan	100 Org	669	100 Org	702	100 Org	737	100 Org	774	100 Org	813	APBD II	Dinas Koperasi, UMKM dan Perindustrian	

Strategi	Program		Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector
	Kegiatan					Jangka Panjang											
	Sub Kegiatan					2029		2030		2031		2032		2033			
						Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.		
peran kelembagaan dan pengawasan	Pemberdayaan Kelembagaan, Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro				pemerintah dalam pendataan UMKM di Kabupaten Luwu sehingga mendapatkan kesempatan yang sama dalam pengembangan usaha ke depannya												
	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro																
<b>Ec.1.2.1</b> Melaksanakan dan mengakselerasikan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dengan berfokus pada pada pengoptimalan sumber ekonomi unggulan daerah dan sector baru yang berkesesuaian dengan potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam daerah	<b>Ec.1.2.1.P1</b> Meningkatnya Kemandirian Daya Saing dan Produktifitas Koperasi, UMKM dan Industri Kecil Menengah		Meningkatnya Kualitas SDM bagi Pelaku UMKM		<b>UGI</b> (UMKM Go Internasional)  adalah program yang dilakukan guna mempersiapkan UMKM dapat bersaing dalam pasar internasional melalui serangkaian pelatihan dan peningkatan kualitas SDM-nya	100 pelaku usaha	303	100 pelaku usaha	319	100 pelaku usaha	335	100 pelaku usaha	351	100 pelaku usaha	369	APBD II	Dinas Koperasi, UMKM dan Perindustrian
	Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, Kemudahan, Perijinan, Penguatan Kelambagaan dan Koordinasi dengan para Pemangku Kepentingan																
	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil Menengah																
<b>Ec.2 KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>																	
<b>Ec.2.1.1</b> Meningkatkan jumlah dan kualitas sarana dan prasana pertanian	<b>Ec.2.1.1.P1</b> PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		Cakupan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan,	SNI 20.1 Persentase tahunan dari anggaran yang dihabiskan	<b>Smart Farming</b>  adalah inovasi yang dikembangkan	20 Ha	1500	20 Ha	1.500	APBD II	Dinas Pertanian						

Strategi	Program		Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector		
	Kegiatan					Jangka Panjang													
	Sub Kegiatan					2029		2030		2031		2032		2033					
						Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.				
	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikroorganisme kewenangan Kabupaten/Kota		Tumbuhan dan Mikroorganisme kewenangan Kabupaten/Kota	untuk inisiatif pertanian	untuk mendukung peningkatan produktivitas pertanian menggunakan bantuan perkembangan TIK di bidang pertanian														
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pertanian																		
Ec.2.1.2 Melakukan diversifikasi produk tanaman pangan	Ec.2.1.2.P1 Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan		Jumlah Kelompok Wanita yang Mengembangkan Kawasan Rumah Pangan Lestari		Dapur B2SA (Beragam Bergizi, Seimbang dan Aman)  adalah pemberdayaan kelompok wanita dalam pengembangan program kawasan rumah pangan lestari dan mengedukasi masyarakat dalam penyediaan makanan keluarga yang sehat dan berkualitas	75 KWT	2.886	85 KWT	3.086	95 KWT	3.286	105 KWT	3.486	115 KWT	3.686	APBD	Dinas Ketahanan Pangan		
	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi																		
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal																		
Ec.2.1.3 Mendorong penerapan kebijakan pengendalian dan	Ec.2.1.3.P1 Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan yang dilaksanakan		Jumlah Laporan hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	SNI 5,4 Persentase Angkatan kerja yang bekerja di sektor pendidikan,	SiBapok (Sistem Informasi Bahan Pokok)  adalah program	1 dokumen	50	1 dok	50	APBD	Bag Ekbang								
	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian																		



Strategi	Program		Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector
	Kegiatan	Sub Kegiatan				Jangka Panjang											
						2029		2030		2031		2032		2033			
						Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.		
		Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah			adalah sistem yang menunjukkan keterbukaan informasi mengenai besaran pajak dan retribusi daerah												

Sumber: Analisis Tim, 2023

SiAP UMKM dimulai dengan memasang target 50 orang untuk siap untuk didata secara potensi untuk kemudian dikembangkan. Jumlah ini terus bertambah setiap tahunnya hingga tiap tahunnya terdapat 100 orang yang dipersiapkan. Begitu juga dengan UMKM Go Internasional yang dimulai dari target 50 pelaku usaha, kemudian naik menjadi 70 pelaku usaha hingga akhirnya setiap tahun terdapat 100 pelaku usaha yang diberikan pelatihan untuk dapat bersaing dengan UMKM lainnya. Sementara itu, untuk inovasi yang berkaitan dengan pertanian, smart farming diharapkan dapat mulai diterapkan pada 19 hektar lahan untuk kemudian secara bertahap naik menjadi 20 hektar yang dikembangkan setiap tahunnya. Untuk Dapur B2SA, indikator kinerjanya adalah pada jumlah kelompok Wanita yang mengembangkan kawasan rumah pangan lestari. Jumlah ini diharapkan naik secara bertahap dari 37 kelompok Wanita hingga 115 di akhir periode perencanaan jangka panjang. Sedangkan untuk SiBaPok, tiap tahunnya diharapkan ada laporan hasil pengendalian dan distribusi pertanian. Pada pengembangan transaksi keuangan, OTO QRIS dan SIPAREDA diharapkan menjadi awal penggunaan pembayaran nontunai. Penerapannya dimulai dari program-program pemerintah seperti pembayaran pajak daerah. Program ini dimulai di tahun 2024 dengan target dokumen rencana pengelolaan pajak. Diharapkan target tercapai 100% setiap tahunnya.

**5.4 PETA JALAN SMART LIVING**

Pada dimensi ini, terdapat 5 (lima) inovasi yang dimunculkan untuk menjawab isu-isu strategis terkait dengan peningkatan kualitas hidup di Kabupaten Luwu. Berikut adalah peta jalan pembangunan smart city untuk dimensi smart living.

**Tabel 26 Peta Jalan Jangka Pendek dan Jangka Menengah Smart Living**

Strategi	Program		Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector
	Kegiatan					Jangka Pendek		Jangka Menengah									
	Sub Kegiatan					2024		2025		2026		2027		2028			
						Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.		
<b>Lv.1 TATA RUANG YANG HARMONIS</b>																	
Lv.1.1.1 Optimalisasi Pengelolaan Data dan Informasi	Lv.1.1.1.P1 Pelaksanaan Penataan Ruang		Jumlah Sistem Informasi Penataan Ruang yang disediakan	SNI 21.4 Persentase populasi kota yang hidup dalam kepadatan populasi sedang hingga tinggi	<b>SI-PETARUNG</b> (Sistem Penataan Ruang)  adalah sistem informasi yang memuat mengenai rencana, implementasi, dan pengendalian tata ruang Kabupaten Luwu	27	278,8	27	278,8	27	278,8	27	278,8	30	310	APBD	DINAS PUTR, BPN/ATR, PERKIM, SATPOL PP, DINAS PERTANAHAN, CAMAT, LURAH/DESA, MASYARAKAT, KEJAKSANAAN, POLRES,
	Sistem Informasi Penataan Ruang																
	Pelaksanaan persetujuan substansi, evaluasi, konsultasi evaluasi dan penetapan RTRW Kab/Kota																
<b>Lv.2 PRASARANA KESEHATAN</b>																	
Lv.2.1.1 Meningkatkan aksesibilitas pelayanan kesehatan yang muda, cepat dan terjangkau serta terintegrasi	Lv.2.1.1 Program upaya pemenuhan kesehatan perorangan dan upaya pemenuhan kesehatan masyarakat		Terbangunnya sistem informasi pelayanan kesehatan terintegrasi berbasis online	SNI 11.1 Persentase populasi yang masuk dalam file kesehatan terpadu daring yang dapat diakses oleh penyedia	<b>SIPAKATAU-KI</b> (Sistem Informasi Pelayanan Kesehatan yang cepat dan terjangkau, kolektif dan terintegrasi)  adalah inovasi di bidang pelayanan											APBD	Dinas Kesehatan, RSUD Batara Guru
	Penyelenggaraan sistem informasi kesehatan yang terintegrasi																

Strategi	Program		Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector
	Kegiatan	Sub Kegiatan				Jangka Pendek		Jangka Menengah									
						2024		2025		2026		2027		2028			
						Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.		
		Pengelolaan sistem informasi kesehatan		layanan kesehatan	kesehatan yang dapat diakses secara digital dan mendorong terintegrasinya berbagai informasi kesehatan dalam satu sistem	50%	30	50%	35	100%	40	100%	45	100%	75		
						1dok	50	50%	35	100%	35	100%	35	100%	35		
<b>Lv.2.1.2</b> Meningkatkan akses pelayanan rekomendasi perizinan di Kantor Dinkes Kab. Luwu	<b>Lv.2.1.2.P1</b> Program upaya pemenuhan kesehatan perorangan dan upaya pemenuhan kesehatan masyarakat	Penyelenggaraan sistem informasi kesehatan yang terintegrasi	Terlaksananya pelayanan rekomendasi perizinan yang online		<b>Pelayanan Rekomendasi Perizinan SI-CETAR</b> (Sistem yang cepat, tanggap dan Ramah)  adalah sistem perizinan untuk sarana pendukung kesehatan yang dapat diakses secara digital	100%	25	100%	30	100%	35	100%	40	100%	45		
		Pengelolaan data dan informasi kesehatan															
<b>Lv.2.1.3</b> Menciptakan lingkungan perawatan rumah sakit yang bersih dan aman	pembangunan unit rumah tunggu untuk keluarga pasien yang berasal dari wilayah terpencil dan luar kabupaten luwu	Pembangunan Rumah Kurcaci	terwujudnya lingkungan rumah sakit yang aman, nyaman dan bersih dengan tidak ditemukan lagi keluarga pasien istirahat dilorong-lorong koridor perawatan rumah sakit		<b>Rumah KURCACI RSUD</b> (rumah tunggu untuk keluarga pasien yang sementara di rawat di Rumah sakit Batara Guru)	100 %	300	100 %	400	100 %	450	100 %	500	100 %	600		

Strategi	Program	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector
	Kegiatan				Jangka Pendek		Jangka Menengah									
	Sub Kegiatan				2024		2025		2026		2027		2028			
					Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.		
<b>Lv.3 SARANA TRANSPORTASI</b>																
Lv.3.1.1 Pengembangan Angkutan Umum	Lv.3.1.1.P1 Program Penyelenggaraan	Cakupan Penyelenggaraan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten	SNI 19.1 Persentase jalan uum dan jalan berbayar yang dicakup oleh peringatan dan informasi lalu lintas daring langsung (real-time)	SI-PELARI (Sistem Layanan Transportasi Terintegrasi)  adalah sistem terpadu yang memuat berbagai data dan informasi mengenai sarana dan prasarana transportasi di Kabupaten Luwu, termasuk informasi mobilitas dalam sistem transportasi	100%	330	100%	6	100%	50	100%	50	100%	50	APBD	DISHUB, PUTR; BPBD, Dinkes, Sat-lantas, Satpol-PP, Perkim, Dinas Perdagangan, Dinas Pertanian, KOMINFO, Organda
	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten															
	Penyediaan Perlengkapan															
	Lv.3.1.1.P2 Lalu Lintas angkutan jalan															
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten	Persentase pemasangan rambu - rambu lalu lintas	SNI 19.5 Persentase jalur transportasi umum yang dilengkapi dengan sistem langsung (real-time) yang dapat diakses publik		21%	1.676	22,00%	1.971	23%	2.001	24%	2.001	25%	2.001		
Jalan di jalan Kab/Kota		SNI 19.6 Persentase layanan transportasi umum yang dicakup oleh sistem layanan terpadu	100%	1.090	100%	1.090	100%	1.090	100%	1.090	100%	1.090				
Pengelolaan Terminal Penumpang	Cakupan penyelenggaraan pengelolaan terminal penumpang Tipe C	SNI 19.8 Persentase ruang parkir umum yang dilengkapi	100%	3.528	100%	1.114	100%	1.059	100%	1.059	100%	1.059				
Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten	Cakupan Pelaksanaan Manajemen dan rekayasa Lalu Lintas untuk jaringan jalan kabupaten															

Strategi	Program		Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector
	Kegiatan	Sub Kegiatan				Jangka Pendek		Jangka Menengah									
						2024		2025		2026		2027		2028			
						Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.		
	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan / Perdesa		Cakupan penyelenggaraan pengembangan jaringan trayek perkotaan	dengan sistem ketersediaan parkir  SNI 19.12 Persentase rute angkutan umum dengan konektivitas internet yang disediakan dan/atau dikelola oleh komuter  SNI 19.14 Persentase armada bus kota yang digerakkan dengan motor		100%	235	100%	150	100%	150	100%	150	100%	150		

Sumber: Analisis Tim, 2023

Tabel 27 Peta Jalan Jangka Panjang Smart Living

Strategi	Program		Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector
	Kegiatan	Sub Kegiatan				Jangka Panjang											
						2029		2030		2031		2032		2033			
						Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.		
<b>Lv.1 TATA RUANG YANG HARMONIS</b>																	
Lv.1.1.1 Optimalisasi Pengelolaan	Lv.1.1.1.P1 Pelaksanaan Penataan Ruang		Jumlah Sistem Informasi Penataan Ruang yang disediakan	SNI 21.4 Persentase populasi kota yang	<b>SI-PETARUNG</b> (Sistem Penataan Ruang)	Maintenance/operasional	325,5	Maintenance/operasional	341,775	Maintenance/operasional	358,9	Maintenance/operasional	376,8	Maintenance/operasional	395,6	APBD	DINAS PUTR, BPN/ATR, PERKIM, SATPOL PP,

Strategi	Program		Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector	
	Kegiatan	Sub Kegiatan				Jangka Panjang												
						2029		2030		2031		2032		2033				
						Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.			
Data dan Informasi	Sistem Informasi Penataan Ruang	Pelaksanaan persetujuan substansi, evaluasi, konsultasi evaluasi dan penetapan RTRW Kab/Kota	hidup dalam kepadatan populasi sedang hingga tinggi  SNI 21.1 Jumlah warga per 100.000 penduduk per tahun yang terlibat dalam proses perencanaan	adalah sistem informasi yang memuat mengenai rencana, implementasi, dan pengendalian tata ruang Kabupaten Luwu													DINAS PERTANAHAN, CAMAT, LURAH/DESA, MASYARAKAT, KEJAKSANAAN, POLRES,	
<b>Lv.2 PRASARANA KESEHATAN</b>																		
Lv.2.1.1 Meningkatkan aksesibilitas pelayanan kesehatan yang muda, cepat dan terjangkau serta terintegrasi	Lv.2.1.1 Program upaya pemenuhan kesehatan perorangan dan upaya pemenuhan kesehatan masyarakat	Terbangunnya sistem informasi pelayanan kesehatan terintegrasi berbasis online	SNI 11.1 Persentase populasi yang masuk dalam file kesehatan terpadu daring yang dapat diakses oleh penyedia layanan kesehatan	SIPAKATAU-KI (Sistem Informasi Pelayanan Kesehatan yang cepat dan terjangkau, kolektif dan terintegrasi)  adalah inovasi di bidang pelayanan kesehatan yang dapat diakses secara digital dan mendorong terintegrasinya berbagai informasi kesehatan dalam satu sistem													APBD	Dinas Kesehatan, RSUD Batara Guru
	Penyelenggaraan sistem informasi kesehatan yang terintegrasi																	
	Pengelolaan sistem informasi kesehatan	Sarpras dan Maintenance aplikasi SIPAKATAU-KI			78,75	Sarpras dan Maintenance aplikasi SIPAKATAU-KI	82,69	Sarpras dan Maintenance aplikasi SIPAKATAU-KI	86,82	Sarpras dan Maintenance aplikasi SIPAKATAU-KI	91,16	Sarpras dan Maintenance aplikasi SIPAKATAU-KI	95,72					
					Dokumen Perbup	80	Dokumen Perbup	80	-	-	-	-	-	-	-	-		

Strategi	Program		Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector
	Kegiatan					Jangka Panjang											
	Sub Kegiatan					2029		2030		2031		2032		2033			
						Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.		
Lv.2.1.2 Meningkatkan akses pelayanan rekomendasi perizinan di Kantor Dinkes Kab. Luwu	Lv.2.1.2.P1 Program upaya pemenuhan kesehatan perorangan dan upaya pemenuhan kesehatan masyarakat		Terlaksananya pelayanan rekomendasi perizinan yang online		<b>Pelayanan Rekomendasi Perizinan SI-CETAR</b> (Sistem yang cepat, tanggap dan Ramah)  adalah sistem perizinan untuk sarana pendukung kesehatan yang dapat diakses secara digital	Perangkat lunak software Si-Cetar	50	Perangkat lunak software Si-Cetar	52,5	Perangkat lunak software Si-Cetar	55,1	Perangkat lunak software Si-Cetar	57,9	Perangkat lunak software Si-Cetar	60,8		
	Penyelenggaraan sistem informasi kesehatan yang terintegrasi																
	Pengelolaan data dan informasi kesehatan																
Lv.2.1.3 Menciptakan lingkungan perawatan rumah sakit yang bersih dan aman	pembangunan unit rumah tunggu untuk keluarga pasien yang berasal dari wilayah terpencil dan luar kabupaten luwu		terwujudnya lingkungan rumah sakit yang aman, nyaman dan bersih dengan tidak ditemukan lagi keluarga pasien istirahat dilorong-lorong koridor perawatan rumah sakit		<b>Rumah KURCACI RSUD</b> (rumah tunggu untuk keluarga pasien yang sementara di rawat di Rumah sakit Batara Guru)	Maintenance/operasional	650	Maintenance/operasional	682,5	Maintenance/operasional	716,6	Maintenance/operasional	752,5	Maintenance/operasional	790,1		
	Pembangunan Rumah Kurcaci																
<b>Lv.3 SARANA TRANSPORTASI</b>																	
Lv.3.1.1 Pengembangan Angkutan Umum	Lv.3.1.1.P1 Program Penyelenggaraan		Cakupan Penyelenggaraan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten	SNI 19.1 Persentase jalan umum dan jalan berbayar yang dicakup oleh	<b>SI-PELARI</b> (Sistem Layanan Transportasi Terintegrasi)  adalah sistem	100%	50	100%	52,5	100%	55,1	100%	57,9	100%	60,8	APBD	DISHUB, PUTR; BPBD, Dinkes, Sat-lantas, Satpol-PP, Perkim, Dinas Perdagangan, Dinas
	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten																



Strategi	Program		Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector
	Kegiatan	Sub Kegiatan				Jangka Panjang											
						2029		2030		2031		2032		2033			
						Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.		
	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan / Perdesa		Cakupan penyelenggaraan pengembangan jaringan trayek perkotaan	rute angkutan umum dengan konektivitas internet yang disediakan dan/atau dikelola oleh komuter  SNI 19.14 Persentase armada bus kota yang digerakkan dengan motor		100%	157,5	100%	165,4	100%	173,6	100%	182,3	100%	191,4		

Sumber: Analisis Tim, 2023

Untuk penataan ruang, indikator kinerja dinilai dari jumlah sistem informasi penataan ruang yang disediakan. Pada perencanaan jangka pendek, target capaian mencapai 27 dan terus meningkat hingga 30 sistem. Inovasi ini mengintegrasikan sistem dari berbagai instansi yang nantinya berpengaruh terhadap penataan ruang, sehingga semakin banyak sistem yang tergabung, semakin komprehensif pertimbangan dalam perencanaan tata ruang. Sementara untuk inovasi lainnya juga dimulai di jangka pendek dan mencapai 100% target pada perencanaan jangka menengah dan dilakukan pemeliharaan rutin di perencanaan jangka panjang untuk agar sistem atau aplikasi tetap berjalan optimal.

**5.5 PETA JALAN SMART SOCIETY**

Inovasi – inovasi pada smart society berfokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat yang didalamnya termasuk urusan kesehatan dan pelayanan terhadap masyarakat yang memerlukan bantuan kesejahteraan sosial, namun terdapat pula inovasi terkait pelestarian budaya, seperti SIDELU. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah peta jalan pembangunan smart city Kabupaten Luwu yang terkait dengan smart society.

**Tabel 28 Peta Jalan Jangka Pendek dan Jangka Menengah Smart Society**

Strategi	Program		Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector
	Kegiatan					Jangka Pendek		Jangka Menengah									
	Sub Kegiatan					2024		2025		2026		2027		2028			
						Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.		
<b>S.1 INTERAKSI MASYARAKAT</b>																	
S.1.1.1 Meningkatkan kapasitas kelembagaan adat desa RT/RW, Karang Taruna, LPM dan Posyandu	S.1.1.1.P1 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Hukum Adat Masyarakat		Jumlah dokumen hasil penataan, pemberdayaan dan pendayagunaan kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna)	SNI 17.2 Persentase catatan budaya yang telah didigitalkan	SIDELU (Sistem Informasi Desa Luwu) Pelestarian Budaya Desa Buntu Matabbing  berisikan mengenai berbagai informasi desa termasuk potensi desa di bidang budaya	99%	1500	99%	1650	99%	1800	99%	1950	100%	2100	APBD	DPMD, Kecamatan/Desa terkait, Dinas Pariwisata
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kab/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat																

Strategi	Program		Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector				
	Kegiatan					Jangka Pendek		Jangka Menengah													
	Sub Kegiatan					2024		2025		2026		2027		2028							
						Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.						
		yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kab/Kota																			
<b>S.2 EKOSISTEM BELAJAR</b>																					
S.2.1.1 Optimalisasi pelatihan berbasis kebutuhan pasar kerja	S.2.1.1.P1 Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja		Persentase pencari kerja yang telah diberikan pelatihan kerja berdasarkan unit kompetensi	SNI 13.4 Persentase anggaran kota yang dialokasikan untuk penyediaan program yang ditujukan untuk menjembatani kesenjangan digital	JOB SMART (Sistem penguatan kompetensi tenaga kerja terintegrasi)  merupakan pengembangan dari kegiatan pelatihan yang selama ini dilakukan oleh disnakertrans untuk memberikan informasi pelatihan kompetensi dan informasi dua arah antara pencari kerja dengan pemilik pekerjaan	90%	293	100%	300	100%	250	100%	250	100%	250	APBD, APBN, Kemitraan	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi				
	S.2.1.1.P2 Penempatan Tenaga Kerja					Persentase tenaga kerja yang di tempatkan melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kabupaten/ kota	7,41%	161	10%	200	12%	150	15%	150	17%			150	APBD		
	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi																				
	Pelaksanaan Pelatihan Kerja berdasarkan Unit Kompetensi																				
<b>S.3 SISTEM KEAMANAN MASYARAKAT</b>																					
S.3.1.1 Peningkatan kinerja kader	S.3.1.1.P1 Pembinaan Keluarga Berencana		Jumlah Kader IMP yang digerakkan	SNI 10.1 Jumlah kunjungn	<b>PENTING</b> (Petugas Anti Stunting)	227 Kader PPKBD	1260	235 Kader PPKBD	1410	240 Kader PPKBD	1440	245 Kader PPKBD	1470	250 Kader PPKBD	1500	APBN (DAK NON FISIK)	DPPKB, Dinas Kesehatan, DPMD, DP3A,				

Strategi	Program		Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector
	Kegiatan	Sub Kegiatan				Jangka Pendek		Jangka Menengah									
						2024		2025		2026		2027		2028			
						Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.		
dalam pendampingan Ibu Hamil dan Pasangan Usia Subur	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Operasional Kader KB	(PPKBD dan Sub PPKBD)	daring tahunan ke portal data terbuka per 100.000 penduduk	adalah program pengadaan dan pelatihan petugas untuk memberikan penyuluhan terkait keluarga berencana	dan 1033 Kader Sub PPKBD		dan 1175 Kader Sub PPKBD		dan 1200 Kader Sub PPKBD		dan 1225 Kader Sub PPKBD		dan 1250 Kader Sub PPKBD		DAN APBD	Dinas Pendidikan, Depag
<b>S.3.1.2</b> Meningkatkan layanan bantuan untuk pemenuhan kebutuhan dasar bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	<b>S.3.1.2.P1</b> Perlindungan dan Jaminan Sosial	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			<b>SIPANDU PPKS</b> (Sistem Informasi Pendaftaran Penduduk bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial)	18.060 dan 23.477	134.109	20.000 dan 24.000	144.000	22.000 dan 25.000	155.000	24.000 dan 26.000	165.000	25.000 dan 27.000	180.000	APBD	Dinas Sosial, Dinas Kesehatan
		Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah KPM yang mendapatkan fasilitasi bantuan PKH dan Sembako Pangan		adalah sistem informasi untuk berbagai bantuan di bidang sosial dan dapat diakses secara daring guna memastikan ketepatan data dan sinkronisasi data dengan data kependudukan												

Sumber: Analisis Tim, 2023

Tabel 29 Peta Jalan Jangka Panjang Smart Society

Strategi	Program		Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector
	Kegiatan					Jangka Panjang											
	Sub Kegiatan					2029		2030		2031		2032		2033			
						Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.		
<b>S.1 INTERAKSI MASYARAKAT</b>																	
S.1.1.1 Meningkatkan kapasitas kelembagaan adat desa RT/RW, Karang Taruna, LPM dan Posyandu	S.1.1.1.P1 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Hukum Adat Masyarakat		Jumlah dokumen hasil penataan, pemberdayaan dan pendayagunaan kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna)	SNI 17.2 Persentase catatan budaya yang telah didigitalkan	SIDELU (Sistem Informasi Desa Luwu) Pelestarian Budaya Desa Buntu Matabbing  berisikan mengenai berbagai informasi desa termasuk potensi desa di bidang budaya	100% (aplikasi maintenance)	2.300	100% (aplikasi maintenance)	2.500	100% (aplikasi maintenance)	2.700	100% (aplikasi maintenance)	2.900	100% (aplikasi maintenance)	3.100	APBD	DPMD, Kecamatan/ Desa terkait, Dinas Pariwisata
	Fasilitas Penataan, Pembaerdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna)																
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kab/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat																

Strategi	Program		Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector	
	Kegiatan					Jangka Panjang												
	Sub Kegiatan					2029		2030		2031		2032		2033				
						Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.			
		yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kab/Kota																
<b>S.2 EKOSISTEM BELAJAR</b>																		
S.2.1.1 Optimalisasi pelatihan berbasis kebutuhan pasar kerja	S.2.1.1.P1 Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja		Persentase pencari kerja yang telah diberikan pelatihan kerja berdasarkan unit kompetensi	SNI 13.4 Persentase anggaran kota yang dialokasikan untuk penyediaan program yang ditujukan untuk menjembatani kesenjangan digital	JOB SMART (Sistem penguatan kompetensi tenaga kerja terintegrasi)  merupakan pengembangan dari kegiatan pelatihan yang selama ini dilakukan oleh disnakertrans untuk memberikan informasi pelatihan kompetensi dan informasi dua arah antara pencari kerja dengan pemilik pekerjaan	100% (tenaga kerja terlatih telah kompeten)	300	100% (tenaga kerja terlatih telah kompeten)	300	100% (tenaga kerja terlatih telah kompeten)	300	100% (tenaga kerja terlatih telah kompeten)	300	100% (tenaga kerja terlatih telah kompeten)	300	APBD, APBN, Kemitraan, 25% CSR	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	
	S.2.1.1.P2 Penempatan Tenaga Kerja					Persentase tenaga kerja yang di tempatkan melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kabupaten/kota	19%	157,5	21%	165,4	23%	173,6	15%	182,3	17%	191,4		APBD
	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten																	
	Pelayanan antar Kerja																	

Strategi	Program		Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector
	Kegiatan					Jangka Panjang											
	Sub Kegiatan					2029		2030		2031		2032		2033			
						Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.		
<b>S.3 SISTEM KEAMANAN MASYARAKAT</b>																	
S.3.1.1 Peningkatan kinerja kader dalam pendampingan Ibu Hamil dan Pasangan Usia Subur	S.3.1.1.P1 Pembinaan Keluarga Berencana		Jumlah Kader IMP yang digerakkan (PPKBD dan Sub PPKBD)	SNI 10.1 Jumlah kunjungn daring tahunan ke portal data terbuka per 100.000 penduduk	<b>PENTING</b> (Petugas Anti Stunting)  adalah program pengadaan dan pelatihan petugas untuk memberikan penyuluhan terkait keluarga berencana	1.300 kader di desa/kelurahan	2100	1.350 kader di desa/kelurahan	2700	1.400 kader di desa/kelurahan	3300	1.450 kader di desa/kelurahan	3900	80% (1500 kader di desa/kelurahan)	4500	APBN (DAK NON FISIK) DAN APBD	DPPKB, Dinas Kesehatan, DPMD, DP3A, Dinas Pendidikan, Depag
	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)																
	Operasional Kader KB																
S.3.1.2 Meningkatkan layanan bantuan untuk pemenuhan kebutuhan dasar bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	S.3.1.2.P1 Perlindungan dan Jaminan Sosial		Jumlah KPM yang mendapatkan fasilitas bantuan PKH dan Sembako Pangan	SNI 10.1 Jumlah kunjungn daring tahunan ke portal data terbuka per 100.000 penduduk	<b>SIPANDU PPKS</b> (Sistem Informasi Pendaftaran Penduduk bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial)  adalah sistem informasi untuk berbagai bantuan di bidang sosial dan dapat diakses secara daring guna memastikan	25.000 dan 27.000	180.000	25.000 dan 27.000	180.000	25.000 dan 27.000	180.000	25.000 dan 27.000	180.000	25.000 dan 27.000	180.000	APBD	Dinas Sosial, Dinas Kesehatan
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota																
	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga																

Strategi	Program		Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector
	Kegiatan	Sub Kegiatan				Jangka Panjang											
						2029		2030		2031		2032		2033			
						Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.		
					ketepatan data dan sinkronisasi data dengan data kependudukan												

Sumber: Analisis Tim, 2023

Untuk SIDELU pada tahun pertama perencanaan (jangka pendek) dilakukan dengan menetapkan target 99%. Pada pertengahan jangka menengah target ini diharapkan naik menjadi 100%. Dengan siapnya aplikasi ini diharapkan upaya untuk perlindungan budaya dengan meningkatkan interaksi masyarakat antara pelestari budaya dengan generasi muda dapat terjalin dengan semakin baik. SIDELU dapat menjadi langkah awal dalam mengumpulkan informasi mengenai budaya-budaya yang ada dan berkembang di Kabupaten Luwu. Sementara itu, untuk inovasi di bidang pendidikan, terdapat Job Smart yang merupakan implementasi dari 2 (dua) program dengan 2 (dua) indikator kinerja yang harus dicapai, yaitu persentase pencari kerja yang telah diberikan pelatihan berdasarkan kompetensi dan persentase tenaga kerja yang ditempatkan melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kabupaten/kota. Untuk itu inovasi yang dipimpin oleh Dinas Ketenagakerjaan bekerja sama dengan beberapa dinas lainnya menargetkan 90% pencari kerja mendapatkan pelatihan yang dibutuhkan pasar. Target ini terus meningkat hingga mencapai 100% pada 2025. Sedangkan target yang cukup kecil ditetapkan untuk penempatan tenaga kerja melalui mekanisme antar kerja. Dimana target tahun pertama ditetapkan 7,4% dan meningkat secara bertahap sebesar 2-3% setiap tahunnya. Untuk jangka panjang, dalam tahun berjalan diharapkan penempatan tenaga kerja dapat mencapai 25%.

Sedangkan untuk sistem keamanan masyarakat, inovasi PENTING cukup banyak kader IMP yang digerakkan. Pada tahun pertama kader yang ditargetkan mencapai 227 kader PPKBD dan 1.033 Sub PPKBD. Diharapkan hingga akhir jangka menengah kader yang terdaftar mencapai 250 kader PPKBD dan 1.250 sub PPKBD guna memastikan pelayanan terhadap ibu hamil dan pasangan usia subur dapat berjalan dengan optimal. Sedangkan untuk SIPANDU PPKS, diharapkan terdapat 25.000 kelompok penduduk miskin yang mendapatkan bantuan PKH dan 27.000 paket pangan disebar untuk membantu kesejahteraan masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesejahteraan sosial.

**5.6 PETA JALAN SMART ENVIRONMENT**

Dimensi smart environment juga memiliki cukup banyak inovasi yang sebenarnya saling berhubungan. Penjabaran peta jalan pembangunan untuk dimensi smart environment cukup berbeda dengan dimensi lainnya dimana pada smart environment tidak semua berkelanjutan hingga jangka panjang. Hal ini karena inovasi tersebut memang dimunculkan untuk menjadi langkah awal inovasi selanjutnya. Keberlanjutan program dinilai dari keberlanjutan program setelahnya. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah peta jalan pembangunan smart city di Kabupaten Luwu pada dimensi smart environment.

**Tabel 30 Peta Jalan Jangka Pendek dan Jangka Menengah Smart Environment**

Strategi	Program		Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector
	Kegiatan	Sub Kegiatan				Jangka Pendek		Jangka Menengah									
						2024		2025		2026		2027		2028			
						Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.		
<b>En.1 PROTEKSI LINGKUNGAN</b>																	
En.1.1.1 Mengoptimalkan implementasi kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta manajemen penanggulangan bencana	En.1.1.1.P1 PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP		Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang Disusun	SNI 8.2 Jumlah stasiun pemantauan kualitas udara jarak jauh secara langsung (real-time) per kilometer persegi (km2)	RPPLH (Dokumen Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan LH)  merupakan program untuk menyusun dan mengesahkan dokumen RPPLH	1 Dok	300	1 Dok	150	1 Dok	150	1 Dok	150	1 Dok	150	APBD	DLH
		Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota															
		Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	SNI 8.3 Persentase bangunan umum yang dilengkapi untuk memantau kualitas udara dalam ruangan	KLHS (Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis)  merupakan proses penyusunan dokumen KLHS	2 Dok	600	1 Dok	300	1 Dok	300	1 Dok	300	1 Dok	300	APBD, APBN	DLH, PUPR
		Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Perencanaan Tatap Ruang dan RPJPD/RPJMD															
	En.1.1.1.P2 PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP																

Strategi	Program		Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector
	Kegiatan					Jangka Pendek					Jangka Menengah						
	Sub Kegiatan					2024		2025		2026		2027		2028			
						Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.		
	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota																
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut		Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut		<b>MUKA BEMOR (MOBIL UJI EMISI KENDARAAN BERMOTOR KELILING)</b>  merupakan program jemput bola terdapat pengujian kendaraan bermotor di Kabupaten Luwu yang digelar di titik-titik kegiatan masyarakat	1 Dok	500	1 Dok	200	1 Dok	200	1 Dok	200	1 Dok	200	APBD, APBN	DLH
	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan		<b>SI-IKLH (SISTEM INFORMASI INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH)</b>  merupakan sistem yang berisikan informasi mengenai hasil pengukuran indikator-indikator kualitas lingkungan hidup Kabupaten Luwu	12 Bulan	250	12 Bulan	150	12 Bulan	150	12 Bulan	150	12 Bulan	150	APBD, APBN	DLH
	<b>En.1.1.1.P3</b> Konservasi Sumber Daya Alam				<b>Pembangunan Taman Kota, Jalur Hijau</b>  merupakan program peningkatan jumlah kawasan hijau di Kabupaten Luwu	2 Lokasi	500,00	2 Lokasi	500,00	2 Lokasi	500,00	2 Lokasi	500,00	2 Lokasi	500,00	APBD, APBN, CSR	DLH, PERKIM
	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)		Jumlah RTH yang terbangun														
	Pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH)																

Strategi	Program		Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector
	Kegiatan	Sub Kegiatan				Jangka Pendek		Jangka Menengah									
						2024		2025		2026		2027		2028			
						Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.		
<b>En.2 PENGELOLAAN SAMPAH DAN LIMBAH</b>																	
En.2.1.1 Mengupayakan pemenuhan infrastruktur dalam rangka penyehatan lingkungan yang berkualitas	En.2.1.1.P1 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL																
	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota																
	Pembangunan Sarana Pengelolaan Sampah berbasis Masyarakat	Jumlah Pembangunan TPA dan TPS3R	SNI 22.1 Persentase air limbah olahan yang digunakan kembali	<b>Pembangunan TPA Tanjong Kec. Bupon, Pembangunan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu Sistem Reduce, Reuse dan Recycle (TPS3R)</b>	3 Lokasi	6700	2 lokasi	1.000,00	2 lokasi	1.000,00	2 lokasi	1.000,00	2 lokasi	1.000,00	APBD, APBN	PUPR	
	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Pengelolaan Sampah Yang Dikelolah PEMDA	Jumlah Pusat Daur Ulang (PDU) dan Bank Sampah Induk Daerah yang terbangun	SNI 16.2 Persentase populasi yang memiliki pengumpulan sampah dari pintu ke pintu dengan pemantauan individu terhadap jumlah sampah rumah tangga	<b>Pembangunan Pusat Daur Ulang, Bank Sampah Induk Daerah</b>	1 Lokasi	1.500,00	1 Lokasi	250	1 Lokasi	250	1 Lokasi	300	1 Lokasi	300	APBD, APBN	DLH, PUPR	
Penyediaan Sarana Penanganan Persampahan	Tersedianya Sarana Penanganan Persampahan		<b>Penyediaan Anggaran</b> merupakan program yang berkaitan dengan pembangunan sarana dan prasarana pengelolaan sampah di Kabupaten Luwu	3 Unit Truck / 10 Unit Motor	2790	3 Unit Truck / 10 Unit Motor	2800	3 Unit Truck / 10 Unit Motor	2900	3 Unit Truck / 10 Unit Motor	3000	3 Unit Truck / 10 Unit Motor	3100	APBD, APBN	DLH, PUPR		

Strategi	Program		Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector	
	Kegiatan	Sub Kegiatan				Jangka Pendek		Jangka Menengah										
						2024		2025		2026		2027		2028				
						Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.			
En.2.1.2 Mendorong keterlibatan masyarakat dalam rangka mengefektifkan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun dan timbulan	En.2.1.2.P1 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)																	
	Penyimpanan sementara limbah B3																	
	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik			<b>SI SALIM (SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN SAMPAH DAN LIMBAH)</b> merupakan inovasi yang ditujukan untuk memberikan informasi mengenai kondisi pengelolaan sampah di Kabupaten Luwu yang dapat menjadi bahan kajian bagi stakeholder yang terkait dan membutuhkan	1 Paket	75	1 Paket	50	1 Paket	50	1 Paket	50	1 Paket	50	APBD, APBN	DLH
	Pengumpulan limbah B3 dalam 1 daerah Kabupaten																	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan,			<b>SI-MONEV B3 (SISTEM MONITORING DAN EVALUASI LIMBAH B3)</b> adalah program untuk meningkatkan monitoring dan evaluasi terhadap limbah B3	1 Dokumen	50	1 Dokumen	50	1 Dokumen	50	1 Dokumen	50	1 Dokumen	50	APBD, APBN	DLH	

Strategi	Program		Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector
	Kegiatan	Sub Kegiatan				Jangka Pendek		Jangka Menengah									
						2024		2025		2026		2027		2028			
						Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.		
			Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya		<b>Pembangunan Pusat Penyimpanan Sementara Limbah B3 PEMDA</b>	1 Lokasi	500,00	1 Lokasi	500,00	1 Lokasi	500,00	1 lokasi	500	1 lokasi	500	APBD, APBN	DLH, PUPR
<b>En.3 TATA KELOLA ENERGI</b>																	
<b>En.3.1.1</b> Mendorong Pengelolaan Sampah u'ntuk Menjadi Sumber Energi Alternatif	<b>En.3.1.1.P1</b> PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN			SNI 22.1 Persentase air limbah olahan yang digunakan kembali	<b>INSTAN-TPA</b> (INSTALASI PENGELOLAAN GAS METAN PADA TPA)  adalah pengembangan program pengelolaan sampah terpadu untuk memastikan lokasi pengelolaan sampah menghasilkan nilai tambah dari sampah yang diolah												
	Pengelolaan Sampah		Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/Kabupaten	SNI 16.2 Persentase populasi yang memiliki pengumpulan sampah dari pintu ke pintu dengan pemantauan individu terhadap jumlah sampah rumah tangga		53.000 Ton	500	53.000 Ton	200	53.000 Ton	200	53.000 Ton	200	53.000 Ton	200	APBD, APBN	DLH

Sumber: Analisis Tim, 2023

Dimensi mengenai tata kelola lingkungan ini memerlukan dana yang cukup besar dibandingkan dengan lainnya. Untuk itu, beberapa target capaian telah ditetapkan. Target capaian pada inovasi pengelolaan limbah saat ini difokuskan pada penyediaan sarana dan prasarana pengolahan limbah, baik pengolahan limbah domestik maupun limbah B3 industri. Selain itu,

penyiapan fisik ini juga diikuti oleh penyiapan dokumen yang nantinya mendukung pengelolaan limbah sehingga meningkatkan kualitas perlindungan lingkungan. Terdapat pula monitoring dan evaluasi yang dilakukan untuk menjadi langkah awal penilaian kebutuhan fisik pengelolaan limbah. Sehingga jangka waktu monitoring dan evaluasi ini hanya mencapai perencanaan jangka pendek karena nantinya akan dilanjutkan dengan pengembangan pusat pengelolaan limbah. Proteksi lingkungan juga menggagas inovasi uji emisi kendaraan bermotor keliling (MUKA BEMOR). Inovasi ini menargetkan adanya laporan tahunan mengenai kualitas tanah, air, udara, dan laut akibat emisi yang dikeluarkan kendaraan bermotor. Sedangkan untuk tata kelola energi, menargetkan 53.000 ton sampah yang diolah di TPA untuk dimanfaatkan dalam menghasilkan energi ramah lingkungan.

**Tabel 31 Peta Jalan Jangka Panjang Smart Environment**

Strategi	Program		Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector
	Kegiatan	Sub Kegiatan				Jangka Panjang											
						2029		2030		2031		2032		2033			
						Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.		
<b>En.1 PROTEKSI LINGKUNGAN</b>																	
En.1.1.1 Mengoptimalkan implementasi kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta manajemen penanggulangan bencana	En.1.1.1.P1 PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP		Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang Disusun	SNI 8.2 Jumlah stasiun pemantauan kualitas udara jarak jauh secara langsung (real-time) per kilometer persegi (km2)	RPPLH (Dokumen Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan LH)  merupakan program untuk menyusun dan mengesahkan dokumen RPPLH	1 Dok	157,5	1 Dok	165,4	1 Dok	173,6	1 Dok	182,3	1 Dok	191,4	APBD	DLH
	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota															
	Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)		Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	SNI 8.3 Persentase bangunan umum yang dilengkapi untuk memantau kualitas udara dalam ruangan	KLHS (Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis)  merupakan proses penyusunan dokumen KLHS	1 Dok	315	1 Dok	330,75	1 Dok	347,3	1 Dok	364,7	1 Dok	382,9	APBD, APBN	DLH, PUPR
	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS	Perencanaan Tatat Ruang dan RPJPD/RPJMD															
En.1.1.1.P2 PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP																	

Strategi	Program		Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector
	Kegiatan	Sub Kegiatan				Jangka Panjang											
						2029		2030		2031		2032		2033			
						Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.		
	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota																
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut		Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut		<b>MUKA BEMOR</b> (MOBIL UJI EMISI KENDARAAN BERMOTOR KELILING)  merupakan program jemput bola terdapat pengujian kendaraan bermotor di Kabupaten Luwu yang digelar di titik-titik kegiatan masyarakat	1 Dok	200	1 Dok	210	1 Dok	220,5	1 Dok	231,5	1 Dok	243,1	APBD, APBN	DLH
	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota			Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan	<b>SI-IKLH</b> (SISTEM INFORMASI INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH)  merupakan sistem yang berisikan informasi mengenai hasil pengukuran indikator-indikator kualitas lingkungan hidup Kabupaten Luwu	12 Bulan	157,5	12 Bulan	165,4	12 Bulan	173,6	12 Bulan	182,3	12 Bulan	191,4	APBD, APBN	DLH
	<b>En.1.1.1.P3</b> Konservasi Sumber Daya Alam			Jumlah RTH yang terbangun	<b>Pembangunan Taman Kota, Jalur Hijau</b>  merupakan program peningkatan jumlah kawasan hijau di Kabupaten Luwu	2 Lokasi	525	2 Lokasi	551,25	2 Lokasi	578,81	2 Lokasi	607,75	2 Lokasi	638,14	APBD, APBN, CSR	DLH, PERKIM
	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)																
		Pembangunan Ruamg Terbuka Hijau (RTH)															

Strategi	Program		Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector
	Kegiatan	Sub Kegiatan				Jangka Panjang											
						2029		2030		2031		2032		2033			
						Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.		
<b>En.2 PENGELOLAAN SAMPAH DAN LIMBAH</b>																	
En.2.1.1 Mengupayakan pemenuhan infrastruktur dalam rangka penyehatan lingkungan yang berkualitas	En.2.1.1.P1 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL																
	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota			SNI 22.1 Persentase air limbah olahan yang digunakan kembali													
	Pembangunan Sarana Pengelolaan Sampah berbasis Masyarakat		Jumlah Pembangunan TPA dan TPS3R	SNI 16.2 Persentase populasi yang memiliki pengumpulan sampah dari pintu ke pintu dengan pemantauan individu terhadap jumlah sampah rumah tangga	<b>Pembangunan TPA Tanjong Kec. Bupon, Pembangunan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu Sistem Reduce, Reuse dan Recycle (TPS3R)</b>	3 Lokasi	1.050	2 lokasi	1.102,50	2 lokasi	1.157,63	2 lokasi	1.215,51	2 lokasi	1.276,28	APBD, APBN	PUPR
	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Pengelolaan Sampah Yang Dikelolah PEMDA		Jumlah Pusat Daur Ulang (PDU) dan Bank Sampah Induk Daerah yang terbangun		<b>Pembangunan Pusat Daur Ulang, Bank Sampah Induk Daerah</b>	1 Lokasi	315,00	1 Lokasi	330,75	1 Lokasi	347,29	1 Lokasi	364,65	1 Lokasi	382,88	APBD, APBN	DLH, PUPR
Penyediaan Sarana Penanganan Persampahan		Tersedianya Sarana Penanganan Persampahan		<b>Penyediaan Anggaran</b> merupakan program yang berkaitan dengan pembangunan sarana dan prasarana pengelolaan sampah di Kabupaten Luwu	3 Unit Truck / 10 Unit Motor	3.150	3 Unit Truck / 10 Unit Motor	3.150	3 Unit Truck / 10 Unit Motor	3.150	3 Unit Truck / 10 Unit Motor	3.150	3 Unit Truck / 10 Unit Motor	3.150	APBD, APBN	DLH, PUPR	

Strategi	Program		Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector
	Kegiatan	Sub Kegiatan				Jangka Panjang											
						2029		2030		2031		2032		2033			
						Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.		
En.2.1.2 Mendorong keterlibatan masyarakat dalam rangka mengefektifkan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun dan timbulan	En.2.1.2.P1 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)																
		Penyimpanan sementara limbah B3															
		Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Fasilitas Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		SI SALIM (SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN SAMPAH DAN LIMBAH)  merupakan inovasi yang ditujukan untuk memberikan informasi mengenai kondisi pengelolaan sampah di Kabupaten Luwu yang dapat menjadi bahan kajian bagi stakeholder yang terkait dan membutuhkan	1 Paket	52,5	1 Paket	55,13	1 Paket	57,88	1 Paket	60,78	1 Paket	63,81	APBD, APBN	DLH
		Pengumpulan limbah B3 dalam 1 daerah Kabupaten															
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi		SI-MONEV B3 (SISTEM MONITORING DAN EVALUASI LIMBAH B3)  adalah program untuk meningkatkan monitoring dan evaluasi terhadap limbah B3	1 Paket	52,5	1 Paket	55,1	1 Paket	57,9	1 Paket	60,8	1 Paket	63,8	APBD, APBN	DLH	

Strategi	Program		Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector
	Kegiatan	Sub Kegiatan				Jangka Panjang											
						2029		2030		2031		2032		2033			
						Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.		
			Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya		<b>Pembangunan Pusat Penyimpanan Sementara Limbah B3 PEMDA</b>	1 Lokasi	525,00	1 Lokasi	551,25	1 Lokasi	578,81	1 lokasi	607,75	1 lokasi	638,14	APBD, APBN	DLH, PUPR
<b>En.3 TATA KELOLA ENERGI</b>																	
<b>En.3.1.1</b> Mendorong Pengelolaan Sampah u'ntuk Menjadi Sumber Energi Alternatif	<b>En.3.1.1.P1</b> PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN			SNI 22.1 Persentase air limbah olahan yang digunakan kembali  SNI 16.2 Persentase populasi yang memiliki pengumpulan sampah dari pintu ke pintu dengan pemantauan individu terhadap jumlah sampah rumah tangga	<b>INSTAN-TPA</b> (INSTALASI PENGELOLAAN GAS METAN PADA TPA)  adalah pengembangan program pengelolaan sampah terpadu untuk memastikan lokasi pengelolaan sampah menghasilkan nilai tambah dari sampah yang diolah	53.000 Ton	210	53.000 Ton	220,50	53.000 Ton	231,53	53.000 Ton	243,10	53.000 Ton	255,26	APBD, APBN	DLH
		Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPAKabupaten														

Sumber: Analisis Tim, 2023



# 6

---

# PENUTUP

KABUPATEN LUWU

Dokumen ini merupakan dokumen utama dalam perencanaan smart city Kabupaten Luwu dengan memuat dasar pelaksanaan dan kajian untuk digunakan menyusun visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi pengembangan smart city di Kabupaten Luwu. Hal ini dirumuskan berdasarkan diskusi yang dilakukan dengan dewan pelaksana smart city dan analisis strategis yang telah dilakukan sebelumnya dengan luaran sebutah buku analisis strategis Kabupaten Luwu. Di akhir dokumen, secara rinci dijabarkan mengenai rencana aksi dan peta jalan pembangunan untuk program-program terpilih berdasarkan hasil diskusi untuk menjadi program-program smart city Kabupaten Luwu.

Inovasi-inovasi ini kemudian dipilih untuk mewakili masing-masing dimensi sebagai inovasi unggulan yang nantinya dijelaskan dalam buku Quick Win. Ketiga buku yang menyertai Master Plan ini, termasuk buku rangkuman eksekutif, merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam perencanaan pengembangan smart city Kabupaten Luwu nantinya. Untuk itu, diharapkan, perencanaan penerapan smart city di Kabupaten Luwu tidak lepas dari apa yang tertuang dalam dokumen-dokumen tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Hsiao, Y., Wu, M.-H., & Li, S. C. (2019). Elevated Performance of the Smart City— A Case Study of the IoT by Innovation Mode. *IEEE Transactions on Engineering Management*, 68, 1461–1475. <https://doi.org/10.1109/TEM.2019.2908962>
- Meijer, A., & Bolívar, M. (2016). Governing the smart city: a review of the literature on smart urban governance. *International Review of Administrative Sciences*, 82, 392–408. <https://doi.org/10.1177/0020852314564308>
- Ooi, G., & Phua, K. (2007). Urbanization and Slum Formation. *Journal of Urban Health: Bulletin of the New York Academy of Medicine*, 84, 27–34. <https://doi.org/10.1007/s11524-007-9167-5>
- Rizkinaswara, L. (2020). *Mengenal Lebih Dekat Konsep Smart City dalam Pembangunan Kota*. Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika. <https://aptika.kominfo.go.id/2020/10/mengenal-lebih-dekat-konsep-smart-city-dalam-pembangunan-kota/>
- Russell, P. (n.d.). *The Emergence of Smart Cities*.



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU  
2023**

